

**EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR



Disusun oleh

Dramas Sukma Dewi

183300734

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

UNIVERSITAS PUTRA BANGSA

KEBUMEN

2021

**EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md, Akt) Diploma-3 Akuntansi

Disusun oleh:

Dramas Sukma Dewi

183300734

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI

UNIVERSITAS PUTRA BANGSA

KEBUMEN

2021

Pernyataan Bebas Plagiarisme

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar diploma di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman atau sanksi peraturan yang berlaku.

Kebumen, 22 April 2021

Penulis



Dramas Sukma Dewi

HALAMAN PERSETUJUAN

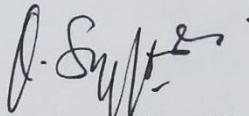
Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Tim Penguji Laporan Tugas Akhir Program Studi D3 Akuntansi

Universitas Putra Bangsa

Kebumen, 22 April 2021

Pembimbing



Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si

PENGESAHAN

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Universitas Putra Bangsa dan diterima untuk memenuhi sebagian
dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.Ak)

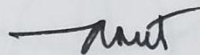
Kebumen, 04 Juni 2021

Disusun oleh

Nama Mahasiswa : Dramas Sukma Dewi
N.I.M : 183300734
Program Studi : Akuntansi D3

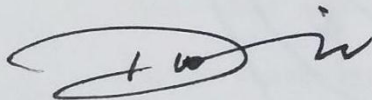
Tim Penguji Tugas Akhir

Ketua



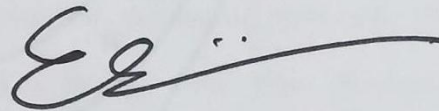
Aris Susetyo, S.E., Ak., MM., CA

Anggota



Dwi Suprajitno, S.E., M.Si., Ak

Anggota



Eko Darmawan Suwandi, SE., Ak.,
MAk., CA.,

Mengesahkan,

Universitas Putra Bangsa

Ketua Program Studi Akuntansi



Aris Susetyo S.E., Ak., MM., CA
NIDN. 0629037502

HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibu Sri Sumastuti dan Bapak Sumedi, terimakasih atas kasih sayang, cinta, doa, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan.
2. Kakak saya Guntur Pura Sadewa dan Oktaviana Dwi Astuti, terimakasih atas dukungan dan semangat dalam menjalani proses perkuliahan ini.
3. Bapak/Ibu Dosen serta civitas akademik Universitas Putra Bangsa yang telah memberikan ilmu dari awal proses perkuliahan hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.
4. Suami saya Febri Susanto yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mengijinkan saya sampai terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman saya yang selalu memberi dukungan, semangat, dan motivasi kepada saya terutama Wira Widiya Rini, Nizar Koniyatul Khotimah, Miftahul Jannah, Endah Oktaviani, dan Khamidatul Khomsah.
6. Teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2018/2019 yang telah memberikan semangat dalam dunia perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia NYA kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan LTA ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Akuntansi pada Universitas Putra Bangsa dengan judul: “EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2019”. Penulisan LTA ini dimaksudkan untuk menerapkan teori yang pernah penyusun peroleh baik di bangku perkuliahan maupun literatur dengan menerapkan fakta yang terjadi sesungguhnya.

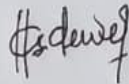
Dalam penyusunan LTA ini, penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dari awal hingga terselesaikan LTA ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga diantaranya:

1. Bapak Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing LTA yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dan inspirasi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.

3. Teman-teman D3 Akuntansi angkatan 2018/2019 yang selalu mendukung dan memotivasi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Kebumen, 22 April 2021



Penulis

MOTTO

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan
pada ilmu pengetahuan **(Ali bin Abi Thalib)**

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian
memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu
memisahkanmu dari Allah **(Imam bin Al Qayim)**

Hiduplah seakan kamu akan mati besok, belajarlah seakan kamu
hidup selamanya **(Mahatma Gandhi)**

Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya
dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri,
bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia
di dunia pada umumnya **(Ki Hadjar Dewantara)**

Ketika kamu berani untuk memulai sesuatu, maka kamu harus
bertanggung jawab untuk menyelesaikannya **(Dramas Sukma Dewi)**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.5.1 Manfaat Teoritis	10
1.5.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Otonomi Daerah.....	12
2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah.....	12
2.1.2. Tujuan Otonomi Daerah.....	12
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15

2.3	Retribusi Daerah.....	16
2.3.1	Pengertian Retribusi Daerah	16
2.3.2	Objek Retribusi Daerah.....	17
2.3.3	Subjek Retribusi Daerah	20
2.3.4	Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi	20
2.3.5	Tata Cara Pemungutan Retribusi	21
2.4	Retribusi Pelayanan Parkir	22
2.4.1	Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Parkir	22
2.4.2	Tarif Retribusi Pelayanan Parkir	22
2.4.3	Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir.....	23
2.5	Efektivitas	24
2.6	Kontribusi.....	25
2.7	Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Objek Penelitian	27
3.2	Sumber Data.....	27
3.3	Jenis Data	27
3.4	Populasi dan Sampel	27
3.5	Metode Pengumpulan Data	28
3.6	Teknik Analisis Data.....	28
3.6.1	Efektivitas	28
3.6.2	Kontribusi.....	29
3.6.3	Laju Pertumbuhan	30
BAB IV HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Gambaran Umum.....	31
4.1.1	Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen ...	31
4.1.2	Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen.....	31
4.1.3	Visi Misi.....	32
4.1.4	Struktur Organisasi.....	33
4.2	Deskripsi Data.....	34
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah	35

4.2.2	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	35
4.3	Analisis Data.....	36
4.3.1	Efektivitas	36
4.3.2	Kontribusi.....	40
4.3.3	Laju Pertumbuhan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		50
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019	4
Tabel I.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019	5
Tabel I.3 Realisasi Anggaran Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019.....	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	29
Tabel III.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	29
Tabel III.3 Klasifikasi Laju Pertumbuhan	30
Tabel IV.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen	35
Tabel IV.2 Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Kebumen	35
Tabel IV.3 Efektivitas Retribusi Parkir Tahun 2017-2019.....	39
Tabel IV.4 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD.....	43
Tabel IV.5 Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Parkir	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kartu Bimbingan
Lampiran II	Kartu Seminar
Lampiran III	Surat Ijin Penelitian
Lampiran IV	Surat Jawaban Ijin Penelitian
Lampiran V	Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efektivitas, rasio tingkat pertumbuhan, dan rasio kontribusi retribusi parkir. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan rata-rata tingkat efektivitas retribusi parkir kurang efektif yang memiliki tingkat 75%. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, rata-rata kontribusi retribusi parkir relatif tidak berkontribusi dengan menunjukkan rata-rata 0,18%. Kemudian perhitungan laju pertumbuhan kurang berhasil dengan rata-rata 33,03%.

Kata kunci : Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness and contribution of parking fees to the Regional Original Revenue of Kebumen Regency in 2017-2019. The research method used is the documentation method. The analytical method used in this research is quantitative descriptive analysis by calculating the ratio of effectiveness, ratio of growth rate, and contribution ratio of parking fees. The results showed that based on the average level of effectiveness of less effective parking fees which have a level of 75%. Based on the results of the calculation of contributions, the average contribution of parking fees does not contribute, showing an average of 0.18%. Then the calculation of the growth rate is less successful with an average of 33.03%.

Keywords: *Parking Retribution, Local Own Income, Effectiveness, Contribution, Growth Rate.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Utami, 2018). Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut aktif untuk menggali potensi perekonomian yang ada pada daerahnya. Karena perkembangan suatu daerah ditandai dengan adanya perkembangan pada bidang ekonomi.

Perkembangan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan suatu daerah. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan peran ekonomi dan keuangan untuk menunjang pendapatan daerah. Sumber keuangan terbesar suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Subagiyo, 2018).

Pendapatan asli daerah harus digali sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Peran pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin

besar penerimaan pendapatan asli daerah, maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat semakin rendah. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah berasal dari sumber-sumber penerimaan yang ada pada daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*) (Aldiansyah, 2019).

Dari sumber-sumber PAD tersebut, sumber yang memiliki potensi cukup tinggi yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan Pemerintah Daerah. Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan (Utami, 2018).

Retribusi daerah selain sebagai sumber pendapatan daerah, juga memiliki peran dan kontribusi untuk menunjang pemerintah daerah. Setiap daerah harus mampu menciptakan dan mendorong sumber-sumber pendapatan daerahnya, diantaranya retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan yang utama, tetapi retribusi parkir memiliki potensi yang tinggi untuk pendapatan daerah. Retribusi parkir adalah fasilitas di bahu jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir, adanya iuran atas penggunaan jasa parkir (Gustika, 2018:114).

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi parkir dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan terhadap pengguna sehingga pembayaran retribusi juga akan lebih baik. Hasil dari retribusi dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pada daerah itu sendiri.

Seperti pada daerah lainnya, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kebumen,

diantaranya di bidang ekonomi. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melakukan pemungutan retribusi daerah terutama bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha memungut retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat mencapai target realisasi yang sudah ditetapkan.

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	437.343.224.000	443.512.538.190	101,41
2018	354.092.341.000	352.133.991.681,38	96,72
2019	406.995.982.000	409.252.966.426	100,55

Sumber : Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan setiap tahunnya dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen mencapai Rp 443.512.538.190 dengan prosentase sebesar 101,41%. Namun pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dengan realisasi Rp 352.133.991.681,38 dan prosentase sebesar 96,72%. Dan pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen kembali meningkat sebesar Rp 409.252.966.426 dengan prosentase 100,55%.

Pemungutan retribusi daerah berdampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah menjadi sumber pendapatan yang penting, karena sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi (Permana, 2013:12).

Tabel I.2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD
2017	79.479.454.753	22.486.222.835	21.901.327.127	319.645.533.475
2018	96.775.593.102	37.508.793.773	9.734.494.832	208.115.109.974,38
2019	110.614.568.810	27.140.374.292	14.210.376.188	257.287.647.136

Sumber : Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Dari tabel I.2 menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan kedua setelah pajak daerah. Pada tahun 2017 retribusi daerah menyumbang sebesar Rp 22.486.222.835. Kemudian pada tahun 2018 retribusi daerah mengalami peningkatan mencapai Rp 37.508.793.773. Tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan pada penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 27.140.374.292.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Kebumen menaikkan tarif parkir kendaraan tepi jalan umum. Kenaikan tarif tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Retribusi

parkir Di Tepi Jalan Umum. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan tarif parkir diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen.

Tabel I.3 Realisasi Anggaran Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	704.000.000	564.063.000	80
2018	1.000.000.000	759.535.000	76
2019	1.140.000.000	800.241.000	70

Sumber : Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019 belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun realisasi setiap tahunnya selalu meningkat. Anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen terlalu tinggi, sehingga realisasi yang didapatkan juga belum dapat mencapai target. Pada tahun 2017 pencapaian realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar Rp 564.063.000 dengan prosentase sebesar 80%. Pada tahun 2018 penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 759.535.000 dengan prosentase 76%. Pada tahun 2019 penerimaan retribusi pelayanan parkir jauh dari anggaran yang ditargetkan tetapi meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 800.241.000 dengan prosentase 70%.

Pada tahun 2018 retribusi parkir menurun disebabkan karena beberapa took menerapkan parkir gratis yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Banyak potensi parkir yang hilang. Pembangunan Pasar Koplak menjadi salah satu contoh nyata hilangnya potensi parkir akibat adanya pembangunan pada tahun 2019. Banyak titik parkir yang digunakan untuk berjualan, hal ini berdampak pada pendapatan dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen.

Mahmudi dalam Mosal (2013:377) menyatakan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Retribusi daerah dikatakan efektif apabila realisasi memenuhi target yang ditentukan dan memenuhi kriteria keefektifan.

Kontribusi adalah suatu keterlibatan atau sesuatu yang diberikan untuk tujuan tertentu. Kontribusi retribusi daerah dapat dihitung melalui analisis pendapatan daerah dengan laporan realisasi anggaran. Mikha dalam Mustoffa (2018:3) menyatakan menjelaskan analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang

jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut.

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi retribusi daerah dilakukan oleh Wahyuningsih&Rahmadiyahanti (2017) dengan hasil efektivitas realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen pada tahun 2013-2015 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata 123,13%, pertumbuhan dari realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata 102,125% , dan kontribusi realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTKP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kontribusi sedang dengan presentase rata-rata sebesar 21,84%.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terutama retribusi parkir karena adanya perubahan peraturan mengenai tarif parkir pada tahun 2017 dan pentingnya retribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dengan judul penelitian “Efektivitas Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya yaitu terkait efektivitas dan kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019?
2. Bagaimana efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019?
3. Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019?
4. Bagaimana laju pertumbuhan retribusi parkir Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dibutuhkan batasan masalah agar lebih terfokus. Mengingat banyaknya sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen, peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen yaitu efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan setiap tahun penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui laju pertumbuhan retribusi parkir Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan teori serta ilmu pengetahuan terkait Retribusi Daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah.

3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa mengenai efektivitas dan kontribusi Retribusi Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Siregar dalam Utami (2018:4) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi daerah maka urusan yang menjadi hak dan tanggung jawab daerah meningkat.

2.1.2. Tujuan Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa tujuan Otonomi Daerah

adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan administratif yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi adalah

terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Novia (2014:3072) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah dan hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ningrum (2020:14) menyatakan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan sumber keuangan daerah yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain sebagainya pendapatan asli daerah lain yang dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri yang bisa dipungut dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Wahyuningsih dan Rahmadiyanti (2017:77) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1. Pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.
2. Retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.
4. Lain-lain PAD yang sah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - b. Jasa giro.
 - c. Pendapatan bunga.
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - e. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011:15).

Retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah (Wahyuningsih dan Rahmadiyanti, 2017:78).

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

2.3.2 Objek Retribusi Daerah

Mardiasmo (2011:16) menjelaskan yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.3.3 Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.3.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Mardiasmo (2011:18) menerangkan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.4 Retribusi Pelayanan Parkir

2.4.1 Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Parkir

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Samudra, 2015:282).

Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2.4.2 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kali parkir.

2. Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali parkir.
3. Untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) dan di atas roda 6 (enam) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali parkir.
4. Untuk kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap kali parkir.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diubah menjadi sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali parkir.
- b. Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali parkir.
- c. Untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap kali parkir.
- d. Untuk kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap kali parkir.

2.4.3 Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum, tata cara pemungutan retribusinya yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut oleh petugas parkir dengan menggunakan karcis.
2. Besarnya retribusi yang dipungut oleh petugas parkir harus sesuai dengan besarnya tarif yang tertera dalam karcis.
3. Petugas parkir menerima pembayaran retribusi dan menyetorkan hasil penerimaan retribusi kepada Koordinator Lapangan sesuai wilayah lokasi parkir dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan dilampiri kartu setoran.
4. Koordinator Lapangan menyetorkan hasil penerimaan retribusi dari petugas parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan dilampiri rincian perolehan.
5. Bendahara Penerimaan Dinas melakukan verifikasi hasil setoran retribusi, mengeluarkan tanda bukti pembayaran hasil setoran retribusi, melakukan pembukuan dan menyetorkan hasil retribusi ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

2.5 Efektivitas

Menurut Beni dalam Sartika (2019:2) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.6 Kontribusi

Handoko dalam Ningrum (2020:24) menerangkan kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Hayati (2016:51) menjelaskan Analisis kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wahyuningsih dan Rahmadiyanti (2017)	Analisis Efektivitas Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir Terhadap PAD di Dinas PERINDAGSAR Kabupaten Kebumen	Efektivitas penerimaan RTKP dikatakan sangat efektif (123,13%). Pertumbuhan realisasi penerimaan RTKP menunjukkan pertumbuhan yang positif (102,125%). Dan kontribusi RTKP cenderung meningkat dengan kontribusi sedang (21,84%).
2.	Novia (2014)	Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap PAD Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012	Kontribusi rata-rata yang diberikan sebesar 0,23%.
3.	Hayati (2016)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kabupaten Seruyan	Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif, efektivitas dikatakan sangat efektif, dan kontribusi cenderung meningkat.
4.	Putri (2016)	Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Kabupaten Malang	Kontribusi pada tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,61%.
5.	Ningrum (2020)	Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Boyolalo Tahun 2016-2018	Efektivitas dikatakan sangat efektif. Kontribusi mengalami peningkatan selama periode 2016-2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah data retribusi parkir dan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) (Kuncoro, 2009:145).

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018:148) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Mengingat populasi dari penelitian ini sangat luas, maka peneliti mengambil sampel yaitu Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang

dikhususkan dalam sektor target dan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2017-2019.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti catatan-catatan yang terdapat pada objek penelitian serta laporan-laporan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini (Wahyuningsih dan Rahmadiyanti, 2017:83). Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data penerimaan retribusi parkir dan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Kebumen.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penjelasan mengenai hasil perhitungan efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.6.1 Efektivitas

Untuk mengetahui efektivitas retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap PAD dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Target penerimaan RPTJU}} \times 100\%$$

Ket : RPJU (Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum)

Retribusi parkir dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut :

Tabel III.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Prosentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi dalam Wahyuningsih & Rahmadiyanti (2017)

3.6.2 Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai sumbangan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel III.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Prosentase	Kriteria
0% - 0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1% - 1,9%	Kurang memiliki berkontribusi
2% - 2,9%	Cukup memiliki berkontribusi
3% - 3,9%	Memiliki berkontribusi
>4%	Sangat memiliki berkontribusi

Sumber: Fuad Bawazier (1999:103) dalam Rozzaq (2010)

3.6.3 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan penerimaan retribusi pelayanan parkir bertujuan untuk mengetahui perkembangan retribusi pelayanan parkir dari tahun ke tahun.

Rumus perhitungan Laju Pertumbuhan yaitu :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x :Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Parkir

X_t :Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir pada tahun tertentu

$X(t-1)$:Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir pada tahun sebelumnya

Tingkat untuk mengukur Laju Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Klasifikasi Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2007:91) dalam Safitri (2018)

BAB IV

HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen

Bappenda Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok sebagai Koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4.1.2 Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bappeda berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappenda Kabupaten Kebumen.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappenda Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan Program Pelaksanaan Kebijakan bidang Pendapatan Asli Daerah.
- b. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang PAD.
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang PAD.

- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang PAD.
- e. Pembinaan teknis dan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan di bidang PAD.
- f. Pelaksanaan Administrasi di bidang PAD.
- g. Pelaksanaan Fungsi Koordinator PAD.
- h. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Visi Misi

a. Visi

Bersama menuju masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis dan berkelanjutan.

b. Misi

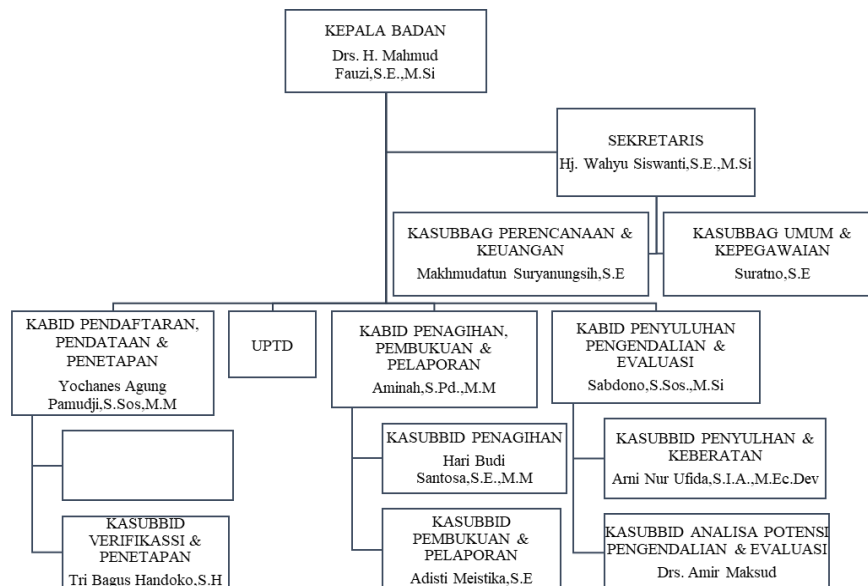
Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekertariat, yang membawahi dua Sub Bagian, yaitu :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - 2. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan
- d. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu :
 - 1. Sub Bidang Penagihan
 - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- e. Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu :
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan
 - 2. Sub Bidang Analisa Potensi, Pengendalian dan Evaluasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



4.2 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kebumen yang terletak di Jl. Indrakila No. 05 Kebumen. Data dalam penelitian ini berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum pada tahun 2017 sampai 2019 di Kabupaten Kebumen. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengujian data dengan rumus efektivitas dan kontribusi.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Tabel IV.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	437.343.224.000	443.512.538.190	101,41
2018	354.092.341.000	352.133.991.681,38	96,72
2019	406.995.982.000	409.252.966.426	100,55

Sumber : Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data laporan realisasi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017 sampai 2019 mengalami fluktuatif. Pendapatan Asli Daerah melebihi target anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 443.512.538.190. Sedangkan pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target dengan pencapaian hanya sebesar Rp 352.133.991.681. Kemudian pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah kembali melebihi target anggaran dengan pencapaian sebesar Rp 409.252.966.426.

4.2.2 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Tabel IV.2 Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Kebumen

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	704.000.000	564.063.000	80
2018	1.000.000.000	759.535.000	76
2019	1.140.000.000	800.241.000	70

Sumber : Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data laporan realisasi pendapatan, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak dapat melebihi target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2017 realisasi retribusi parkir hanya mencapai Rp 564.063.000. Pada tahun 2018 realisasi parkir hanya mencapai Rp 759.535.000 dari anggaran sebesar Rp 1.000.000.000. Dan pada tahun 2019 realisasi parkir mencapai Rp 800.241.000.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Efektivitas

Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum diperoleh dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dengan target/anggaran Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Setelah mendapatkan persentase perbandingannya, maka dilihat apakah memenuhi kriteria efektivitasnya. Jika Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sudah memenuhi kriteria efektivitas dan dikatakan efektif, maka kinerja pemungutan retribusi sudah semakin baik.

Efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Target penerimaan RPTJU}} \times 100\%$$

Kategori efektivitas menurut Mahmudi dalam Wahyuningsih dan Rahmadiyanti (2017) adalah sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = sangat efektif
- b. 90% - 100% = efektif
- c. 80% - 90% = cukup efektif
- d. 60% - 80% = kurang efektif
- e. Kurang dari 60% = tidak efektif

Perhitungan efektivitas retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019 :

- a. Perhitungan pada tahun 2017
 - Realisasi penerimaan parkir tepi jalan umum tahun 2017 sebesar Rp 564.063.000
 - Target/anggaran penerimaan parkir tepi jalan umum tahun 2017 sebesar Rp 704.000.000

Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka presentase efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2017 adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Target penerimaan RPTJU}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{564.063.000}{704.000.000} \times 100\% \\ &= 80,12\% \end{aligned}$$

b. Perhitungan pada tahun 2018

- Realisasi penerimaan parkir tepi jalan umum tahun 2018 sebesar Rp 759.535.000
- Target/anggaran penerimaan parkir tepi jalan umum tahun 2018 sebesar Rp 1.000.000.000

Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka presentase efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2018 adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Target penerimaan RPTJU}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{759.535.000}{1.000.000.000} \times 100\% \\ &= 75,95\% \end{aligned}$$

c. Perhitungan pada tahun 2019

- Realisasi penerimaan parkir tepi jalan umum tahun 2019 sebesar Rp 800.241.000
- Target/anggaran penerimaan parkir tepi jalan umum tahun 2019 sebesar Rp 1.140.000.000

Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka presentase efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2019 adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Target penerimaan RPTJU}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{800.241.000}{1.140.000.000} \times 100\% \\ &= 70,19\%\end{aligned}$$

Di bawah ini disajikan tabel hasil perhitungan efektivitas retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019.

Tabel IV.3 Efektivitas Retribusi Parkir Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran	Realisasi			
	Retribusi	Target	Efektivitas	Kriteria
	Parkir			
2017	564.063.000	704.000.000	80,12%	Cukup Efektif
2018	759.535.000	1.000.000.000	75,95%	Kurang Efektif
2019	800.241.000	1.140.000.000	70,19%	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah Dari BAPPENDA Kebumen

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan, pencapaian tertinggi pada tahun 2017 memperoleh prosentase 80,12% dengan kriteria cukup efektif. Tahun 2018 memperoleh prosentase 75,95% dengan kriteria kurang efektif. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan prosentase 70,19% dengan kriteria kurang efektif.
- b. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum adalah 75,42% dengan kriteria kurang efektif. Artinya Pemerintah Kabupaten Kebumen belum dapat melakukan pemungutan retribusi dengan baik.
- c. Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum selama 3 tahun mengalami peningkatan, tetapi tingkat efektivitas menurun, karena anggaran yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga realisasi yang didapatkan juga belum dapat mencapai target.

4.3.2 Kontribusi

Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari perbandingan antara realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jika hasil perbandingan kontribusi memenuhi kriteria kontribusi, maka

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kategori kontribusi menurut Fuad Bawazier (1999:103)

dalam Rozzaq (2010) adalah sebagai berikut :

- a. 0% - 0,9% = relatif tidak memiliki kontribusi
- b. 1% - 1,9% = kurang memiliki kontribusi
- c. 2% - 2,9% = cukup memiliki kontribusi
- d. 3% - 3,9% = memiliki kontribusi
- e. Lebih dari 4% = sangat memiliki kontribusi

Perhitungan Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019 :

- a. Perhitungan Kontribusi pada tahun 2017
 - Realisasi retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2017 sebesar Rp 564.063.000
 - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sebesar Rp 443.512.538.190

Berdasarkan PAD dan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum maka presentase pencapaian target kontribusi tahun 2017 adalah :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{564.063.000}{443.512.538.190} \times 100\%$$

$$= 0,13\%$$

b. Perhitungan Kontribusi pada tahun 2018

- Realisasi retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2018 sebesar Rp 759.535.000

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 sebesar Rp 352.133.991.681

Berdasarkan PAD dan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum maka presentase pencapaian target kontribusi tahun 2018 adalah :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{759.535.000}{352.133.991.681} \times 100\%$$

$$= 0,22\%$$

c. Perhitungan Kontribusi pada tahun 2019

- Realisasi retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2019 sebesar Rp 800.241.000

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar Rp 409.252.966.426

Berdasarkan PAD dan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum maka presentase pencapaian target kontribusi tahun 2019 adalah :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan RPTJU}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{800.241.000}{409.252.966.426} \times 100\% \\ &= 0,20\%\end{aligned}$$

Berikut disajikan tabel hasil perhitungan kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah :

Tabel IV.4 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD

Tahun Anggaran	Realisasi	Realisasi		Kriteria
	Retribusi	Pendapatan Asli	Kontribusi	
	Parkir	Daerah (PAD)		
2017	564.063.000	443.512.538.190	0,13%	Relatif tidak berkontribusi
2018	759.535.000	352.133.991.681	0,22%	Relatif tidak berkontribusi
2019	800.241.000	409.252.966.426	0,20%	Relatif tidak berkontribusi

Sumber : Data diolah dari BAPPENDA Kebumen

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sebagai berikut :

- a. Tingkat kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 kontribusi retribusi parkir hanya mencapai 0,13%. Kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,22%. Tetapi pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan mencapai 0,20%. Pada tahun 2019 banyak titik parkir atau potensi parkir yang hilang karena adanya pembangunan dan lahan parkir banyak digunakan untuk berjualan. Tingkat prosentase kontribusi masih menunjukkan kriteria relatif tidak berkontribusi. Hal ini membuktikan bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir Kabupaten Kebumen belum maksimal. Adanya perubahan tarif retribusi parkir juga tidak berpengaruh terhadap kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah.
- b. Rata-rata tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen selama tahun 2017 sampai tahun 2019 sebesar 0,18% dengan kriteria relatif tidak berkontribusi. Artinya pemungutan retribusi parkir Kabupaten Kebumen belum maksimal sehingga besarnya kontribusi juga masih kurang.

4.3.3 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan penerimaan retribusi pelayanan parkir bertujuan untuk mengetahui perkembangan retribusi pelayanan parkir dari tahun ke tahun.

Rumus perhitungan Laju Pertumbuhan yaitu :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- G_x : Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Parkir
- X_t : Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir pada tahun tertentu
- X (t-1) : Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir pada tahun sebelumnya

Tingkat untuk mengukur Laju Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

- a. 85% - 100% = Sangat Berhasil
- b. 70% - 85% = Berhasil
- c. 55% - 70% = Cukup Berhasil
- d. 30% - 55% = Kurang Berhasil
- e. Kurang dari 30% = Tidak Berhasil

Perhitungan Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen tahun 2017-2019 maka perhitungan laju pertumbuhan adalah :

a. Perhitungan Laju Pertumbuhan pada tahun 2017

- Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2016 Rp 354.619.500
- Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2017 Rp 564.063.000

Berdasarkan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2016 dan 2017 maka laju pertumbuhan adalah:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

$$G_x = \frac{564.063.000 - 354.619.500}{354.619.500} \times 100\%$$

$$= 59,06\%$$

b. Perhitungan Laju Pertumbuhan pada tahun 2018

- Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2017 Rp 564.063.000
- Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2018 Rp 759.535.000

Berdasarkan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2017 dan 2018 maka laju pertumbuhan adalah:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

$$G_x = \frac{759.535.000 - 564.063.000}{564.063.000} \times 100\%$$

$$= 34,65\%$$

c. Perhitungan Laju Pertumbuhan pada tahun 2019

- Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2018 Rp 759.535.000
- Realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2019 Rp 800.241.000

Berdasarkan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2018 dan 2019 maka laju pertumbuhan adalah:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

$$G_x = \frac{800.241.000 - 759.535.000}{759.535.000} \times 100\%$$

$$= 5,36\%$$

Berikut tabel hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Parkir :

Tabel IV.5 Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Parkir

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Parkir	Laju Pertumbuhan	Kriteria
2017	564.063.000	59,06	Cukup Berhasil
2018	759.535.000	34,65	Kurang Berhasil
2019	800.241.000	5,36	Tidak Berhasil

Sumber : Data diolah dari BAPPENDA Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Tabel IV.5 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan retribusi pelayanan parkir sebagai berikut :

- a. Laju Pertumbuhan penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 yaitu 59,06% dengan kriteria cukup berhasil, pada tahun 2018 menurun menjadi 34,65% dengan kriteria kurang berhasil, dan mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2019 menjadi 5,36% dengan kriteria tidak berhasil. Berdasarkan hasil perhitungan laju pertumbuhan, dapat dikatakan bahwa retribusi pelayanan parkir belum berhasil selama tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi retribusi yang diperoleh setiap tahunnya berpengaruh terhadap laju pertumbuhan.
- b. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2019 sebesar 33,03% dengan kriteria kurang berhasil. Penerimaan retribusi parkir meningkat, namun laju pertumbuhan menurun karena realisasi yang diperoleh belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Target atau anggaran retribusi parkir yang ditetapkan juga terlalu tinggi dan tidak melihat kembali realisasi yang didapatkan pada tahun sebelumnya.
- c. Laju Pertumbuhan penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Cukup Berhasil pada tahun 2017 dengan penerimaan retribusi sebesar Rp

564.063.000 dan mencapai tingkat laju pertumbuhan sebesar 59,06%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 penerimaan Retribusi Parkir mencapai Rp 564.063.000. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp 759.535.000. Dan pada tahun 2019 sebesar Rp 800.241.000. Penerimaan retribusi parkir Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2019 belum mencapai target atau anggaran yang ditetapkan, karena anggaran yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak melihat realisasi sebelumnya sehingga penerimaan pada tahun tersebut belum dapat tercapai.
2. Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Kebumen dari tahun 2017-2019 masih tergolong kriteria kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 75%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir meningkat namun tingkat efektivitas menurun karena realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2017-2019 masih dalam kriteria relatif tidak berkontribusi dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,18%.

4. Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan dan kriteria selama tiga tahun tersebut juga berbeda-beda dari cukup berhasil, kurang berhasil dan tidak berhasil pada tahun 2019. Berdasarkan hasil perhitungan laju pertumbuhan, dapat dikatakan bahwa retribusi pelayanan parkir belum berhasil selama tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi retribusi yang diperoleh setiap tahunnya berpengaruh terhadap laju pertumbuhan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus meningkatkan kinerja dan perannya dalam memberikan pelayanan pemungutan retribusi daerah.
2. Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan peraturan yang berkenaan dengan adanya pemungutan retribusi daerah.
3. Pemerintah harus menerapkan strategi untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
4. Pemerintah harus melakukan evaluasi sebelum menentukan target atau anggaran untuk tahun selanjutnya, sehingga realisasi yang didapat bisa tercapai dengan baik dan tidak terlalu jauh dari anggaran yang ditetapkan.
5. Pemerintah dapat meningkatkan kinerja pengelolaan parkir agar lebih efektif dalam merealisasikan penerimaan parkir.
6. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi, pengendalian, serta melakukan adanya pengawasan terhadap kinerja pengelolaan parkir.
7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, N. F., F. Steviana., dan F. Zakiyah. 2019. Permasalahan Pendapatan Asli Daerah. *Makalah*. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Gustika, G. S. 2018. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 7(4):1-148.
- Hayati, S. 2016. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*. 2(1): 44-60.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Mosal, M. M. 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. 1(4):374-382.
- Mustoffa, A. F. 2018. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 7(1):1-14.
- Ningrum, I. N. A. 2020. Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2018. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Novia, D. 2014. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012. *eJournal Pemerintahan*. 2(3): 3070-3079.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 *Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2013 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2012 *Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.
- Permana, A. I. 2013. Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Putri, R. W. 2016. Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *JESP*. 8(1) : 23-32.

- Rozzaq, G. A. 2010. Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009. *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Safitri, Z. 2018. Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Syariah/Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Sartika, D. 2019. Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Subagiyo, A. 2018. Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karawang. *Jurnal Reformasi Administrasi*. 5(1): 158-164.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan 6. CV ALFABETA Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Utami, W. F. 2018. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2016. *LTA*. D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa.
- Wahyuningsih, S. dan R. Rahmadiyanti. 2017. Analisis Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir terhadap PAD di Dinas PERINDAGSAR Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 6(1):75-87.

LAMPIRAN

Lampiran I Kartu Bimbingan



**KARTU KONSULTASI
LAPORAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : DRAMAS SUKMA DEWI
 NIM : 183300734
 Dosen Pembimbing : AKHMAD SYARIFUDIN S.E. M.Si

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	06/10/2020	Pengajuan Judul	
2	12/10/2020	Konsultasi pra proposal	
3	26/10/2020	Pengajuan Bab I	
4	04/11/2020	Revisi Bab I	
5	28/11/2020	Konsultasi dan perubahan judul	
6	14/12/2020	Pengajuan proposal	
7	17/12/2020	Revisi proposal dan konsultasi	
8	03/01/2021	Revisi proposal	
9	05/01/2021	ACC proposal	
10	20/01/2021	Pengajuan Bab IV	
11	31/01/2021	Revisi Bab IV	
12	03/02/2021	Pengajuan Bab V	
13	05/02/2021	Revisi Bab IV dan Bab V	
14	22/04/2021	ACC LTA	
15			

*Ketentuan Konsultasi LTA Dihalaman Selanjutnya

Program Studi Akuntansi D3
STIE PUTRA BANGSA

Lampiran II Kartu Seminar



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (D3)
KARTU TANDA PESERTA SEMINAR PROPOSAL LAPORAN TUGAS AKHIR (LTA)

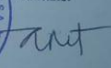
NAMA : DRAMAS SUKMA DEWI
NIM : 183300734

NO	PEMAKALAH		TANGGAL	PARAF MODERATOR	
	NAMA MAHASISWA	NIM			
1.	Nurul Aulia Dewi	183300746	Ika Neni Kristanti S.E.	21/11/2020	
2.	Ranika Etowati	183300740	Ika Neni Kristanti S.E.	21/11/2020	
3.	Misqiatun Apriyani	183300792	Arya Samudra, M.S.E.	27/11/2020	
4.	Mety Fitriyahi	183300721	Arya Samudra, M.S.E.	27/11/2020	
5.	Xulfa Ridha Astuti	183300730	Arya Samudra, M.S.E.	11/12/2020	
6.	Endah Oktaviani	183300735	Aris Susetyo, S.E., M.	09/01/2021	
7.	Akila Wulandari	183300716	Ika Neni Kristanti, S.E.	30/11/2020	

Catatan :

- Kartu ini dibawa pada waktu mengikuti kegiatan seminar
- Kartu ini diisi kemudian diserahkan kepada moderator untuk paraf sebagai tanda bukti
- Sebelum mahasiswa membawakan seminar diharuskan mengikuti kegiatan seminar minimal 6 kali
- Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seminar ialah semester III keatas
- Kartu ini sebagai salah satu syarat ujian skripsi



Ketumda 27 April 2021
Ketun Prodi Akuntansi

ARIS SUSETYO, S.E., M.M., Ak., CA.
NIDN.0629037502

Lampiran III Surat Ijin Penelitian



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PUTRA BANGSA**

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN (SI) DAN AKUNTANSI (D3)
Jl. Ronggowarsito No. 18, Pejagoan, Kebumen - Telp. 0287 - 384011

Nomor : 2/Ket/U.Pen/E/I/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi / LTA

Kebumen, 11 Januari 2021

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Jl. Indrakila No. 5, Indrakila, Sumberadi, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
54317
Di Tempat

Dengan hormat,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua.

Laporan Tugas Akhir / Business Plan / Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memintakan izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

Nama : Dramas Sukma Dewi
NIM : 183300734
Program Studi : Akuntansi D3
Judul Skripsi / : EFEKTIVITAS RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
LTA DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017-2019

Kami mengharapkan bimbingan dan pengarahan untuk mahasiswa tersebut.
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan izin yang telah diberikan diucapkan terima kasih.



Dr. Gunarso Wiwoho, S.E., M.M.
NIDN 0612097501

Lampiran IV Surat Jawaban Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Indrakila Nomor 5 Telp (0287) 384457
K E B U M E N

Kebumen, 15 Januari 2021

Nomor : 028/0292
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Jawaban Ijin Penelitian

Kepada:
Yth. STIE PUTRA BANGSA

Di -

KEBUMEN

Menjawab Surat Saudara Nomor : 2/Ket/U.Pen/E/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Ijin Penelitian Skripsi/LTA, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima ijin tersebut untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Kepada Mahasiswa atas nama **Dramas Sukma Dewi** dengan NIM **183300734** Prodi **D3 Akuntansi**, terhitung mulai tanggal **15 Januari** dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Hj. WANIYUL SISWANTI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19701107 199403 2 006

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bappeda Kab. Kebumen
2. Arsip

Lampiran V Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019

Lampiran V Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2019



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017
BAGIAN BULAN DESEMBER 2017

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH KURANG /LEBIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN	2.739.317.507.000	2.453.847.880.599	259.169.192.807	2.713.017.073.406	99,04	(26.300.433.594)	(0,96)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	437.343.224.000	279.201.706.185	164.310.832.005	443.512.538.190	101,41	6.169.314.190	1,41
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	69.282.500.000	72.655.485.742	6.823.969.011	79.479.454.753	114,72	10.196.954.753	14,72
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.500.000.000	1.101.785.173	108.657.477	1.210.442.650	80,70	(289.557.350)	(19,30)
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	788.500.000	735.431.053	73.244.449	808.675.502	102,56	20.175.502	2,56
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	564.000.000	221.981.620	22.140.528	244.122.148	43,28	(319.877.852)	(56,72)
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	114.000.000	90.798.500	7.425.500	98.224.000	86,16	(15.776.000)	(13,84)
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	32.000.000	36.484.000	2.827.000	39.311.000	122,85	7.311.000	22,85
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	1.500.000	17.090.000	3.020.000	20.110.000	1.340,67	18.610.000	1.240,67
4.1.1.02	Pajak Restoran	4.000.000.000	3.433.979.603	1.007.706.329	4.441.685.932	111,04	441.685.932	11,04
4.1.1.02.02	Rumah Makan	304.750.000	468.408.132	79.795.334	548.203.466	179,89	243.453.466	79,89

4.1.1.02.05	Katering/Jasa Boga	3.695.250.000	2.965.571.471	927.910.995	3.893.482.466	105,36	198.232.466	5,36
4.1.1.03	Pajak Hiburan	127.500.000	141.770.000	11.195.000	152.965.000	119,97	25.465.000	19,97
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	39.000.000	1.000.000	-	1.000.000	2,56	(38.000.000)	(97,44)
4.1.1.03.07	Karaoke	50.700.000	53.300.000	5.450.000	58.750.000	115,88	8.050.000	15,88
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	18.000.000	61.970.000	4.555.000	66.525.000	369,58	48.525.000	269,58
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	13.300.000	11.200.000	890.000	12.090.000	90,90	(1.210.000)	(9,10)
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	6.500.000	14.300.000	300.000	14.600.000	224,62	8.100.000	124,62
4.1.1.04	Pajak Reklame	600.000.000	551.334.398	98.937.788	650.272.186	108,38	50.272.186	8,38
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	446.000.000	310.343.100	83.617.875	393.960.975	88,33	(52.039.025)	(11,67)
4.1.1.04.02	Reklame Kain	154.000.000	240.991.298	15.319.913	256.311.211	166,44	102.311.211	66,44
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	24.300.000.000	24.878.868.088	2.420.178.008	27.299.046.096	112,34	2.999.046.096	12,34
	PPJ PLN area Cilacap	24.200.000.000	24.782.878.344	2.411.005.474	27.193.883.818	112,37	2.993.883.818	12,37
	PPJ PLN area Purwokerto	100.000.000	95.989.744	9.172.534	105.162.278	105,16	5.162.278	5,16
4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000	125.555.130	10.420.000	135.975.130	90,65	(14.024.870)	(9,35)
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000	125.555.130	10.420.000	135.975.130	90,65	(14.024.870)	(9,35)
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	95.000.000	112.940.669	10.562.761	123.503.430	130,00	28.503.430	30,00
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	95.000.000	112.940.669	10.562.761	123.503.430	130,00	28.503.430	30,00
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	1.300.000	3.015.500	4.315.500	43,16	(5.684.500)	(56,85)
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	1.300.000	3.015.500	4.315.500	43,16	(5.684.500)	(56,85)
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000	1.806.136.496	1.066.419.331	2.872.555.827	143,63	872.555.827	43,63

4.1.1.11.04	Batu Kapur	22.000.000	26.853.920	10.795.955	37.649.875	171,14	15.649.875	71,14
4.1.1.11.06	Batu Gunung/Kali	778.000.000	813.613.894	609.118.178	1.422.732.072	182,87	644.732.072	82,87
4.1.1.11.23	Pasir dan kerikil	800.000.000	858.559.721	318.783.810	1.177.343.531	147,17	377.343.531	47,17
4.1.1.11.29	Tanah Timbun	400.000.000	107.108.961	127.721.388	234.830.349	58,71	(165.169.651)	(41,29)
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31.000.000.000	33.544.735.020	458.743.207	34.003.478.227	109,69	3.003.478.227	9,69
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31.000.000.000	33.544.735.020	458.743.207	34.003.478.227	109,69	3.003.478.227	9,69
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000	6.957.081.165	1.628.133.610	8.585.214.775	156,09	3.085.214.775	56,09
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.500.000.000	6.957.081.165	1.628.133.610	8.585.214.775	156,09	3.085.214.775	56,09
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	26.398.541.000	19.275.298.789	3.210.924.046	22.486.222.835	85,18	(3.912.318.165)	(14,82)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	12.964.356.000	7.990.281.557	1.580.900.239	9.571.181.796	73,83	(3.393.174.204)	(26,17)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.120.000.000	2.974.902.057	1.023.251.439	3.998.153.496	56,15	(3.121.846.504)	(43,85)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	120.000.000	126.500.000	7.563.000	134.063.000	111,72	14.063.000	11,72
	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Prembun	7.000.000.000	2.848.402.057	1.015.688.439	3.864.090.496	55,20	(3.135.909.504)	(44,80)
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	698.256.000	697.435.000	65.645.600	763.080.600	109,28	64.824.600	9,28
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISPORAWISATA)	30.000.000	13.815.100	1.399.400	15.214.500	50,72	(14.785.500)	(49,29)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dishub)	50.000.000	39.298.500	4.797.000	44.095.500	88,19	(5.904.500)	(11,81)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Disperindag)	278.256.000	280.251.900	23.191.200	303.443.100	109,05	25.187.100	9,05
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISPERKIM LH)	340.000.000	364.069.500	36.258.000	400.327.500	117,74	60.327.500	17,74
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	704.000.000	487.255.000	76.808.000	564.063.000	80,12	(139.937.000)	(19,88)
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar	3.732.000.000	3.185.757.000	369.083.700	3.554.840.700	95,25	(177.159.300)	(4,75)

4.1.2.01.23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	648.900.000	583.948.500	46.111.500	630.060.000	97,10	(18.840.000)	(2,90)
4.1.2.01.43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	61.200.000	60.984.000	-	60.984.000	99,65	(216.000)	(0,35)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	11.086.200.000	9.611.976.082	1.331.202.807	10.943.178.889	98,71	(143.021.111)	(1,29)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.528.000.000	1.428.272.982	493.403.657	1.921.676.639	125,76	393.676.639	25,76
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Bid. Aset - BPKAD)	150.000.000	288.708.582	8.464.357	297.172.939	198,12	147.172.939	98,12
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISNAKER KUKM)	10.000.000	28.183.000	432.000	28.615.000	286,15	18.615.000	186,15
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISTAPANG)	8.000.000	7.671.000	705.000	8.376.000	104,70	376.000	4,70
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPM PTSP)	171.000.000	146.555.000	27.250.000	173.805.000	101,64	2.805.000	1,64
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinlutkan)	187.000.000	-	135.645.000	135.645.000	72,54	(51.355.000)	(27,46)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISPORAWISATA)	267.000.000	308.737.400	40.770.300	349.507.700	130,90	82.507.700	30,90
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dishub)	60.000.000	53.028.000	19.952.000	72.980.000	121,63	12.980.000	21,63
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPU)	425.000.000	407.400.000	196.375.000	603.775.000	142,06	178.775.000	42,06
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda Bag. Umum)	250.000.000	187.990.000	63.810.000	251.800.000	100,72	1.800.000	0,72
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	875.500.000	1.062.534.600	168.326.950	1.230.861.550	140,59	355.361.550	40,59
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal	180.000.000	140.159.600	16.283.600	156.443.200	86,91	(23.556.800)	(13,09)
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.530.000.000	2.441.145.000	205.639.000	2.646.784.000	104,62	116.784.000	4,62
	Retribusi Tempat Khusus Parkir (DISPORAWISATA)	610.000.000	500.325.000	50.021.000	550.346.000	90,22	(59.654.000)	(9,78)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Disperindag)	1.920.000.000	1.940.820.000	155.618.000	2.096.438.000	109,19	176.438.000	9,19
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2.700.000	2.200.000	40.000	2.240.000	82,96	(460.000)	(17,04)
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.565.000.000	4.385.118.900	423.422.100	4.808.541.000	86,41	(756.459.000)	(13,59)

4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	275.000.000	141.005.000	23.452.500	164.457.500	59,80	(110.542.500)	(40,20)
4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	130.000.000	11.540.000	635.000	12.175.000	9,37	(117.825.000)	(90,63)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.347.985.000	1.673.041.150	298.821.000	1.971.862.150	83,98	(376.122.850)	(16,02)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.059.810.000	1.534.703.650	297.666.000	1.832.369.650	88,96	(227.440.350)	(11,04)
	IMB DPU PR	2.000.000.000	1.391.937.400	266.327.000	1.658.264.400	82,91	(341.735.600)	(17,09)
	IMB Kecamatan Adimulyo	750.000	5.209.000	845.000	6.054.000	807,20	5.304.000	707,20
	IMB Kecamatan Alian	1.000.000	5.046.000	-	5.046.000	504,60	4.046.000	404,60
	IMB Kecamatan Ambal	2.000.000	-	-	-	-	(2.000.000)	(100,00)
	IMB Kecamatan Ayah	3.500.000	7.486.000	565.000	8.051.000	230,03	4.551.000	130,03
	IMB Kecamatan Bonorowo	350.000	990.000	-	990.000	282,86	640.000	182,86
	IMB Kecamatan Buayan	2.000.000	13.615.330	-	13.615.330	680,77	11.615.330	580,77
	IMB Kecamatan Bulus Pesantren	2.000.000	-	2.782.000	2.782.000	139,10	782.000	39,10
	IMB Kecamatan Gombang	2.000.000	31.295.720	-	31.295.720	1.564,79	29.295.720	1.464,79
	IMB Kecamatan Karanganyar	1.000.000	8.245.300	-	8.245.300	824,53	7.245.300	724,53
	IMB Kecamatan Karanggayam	2.000.000	-	2.210.000	2.210.000	110,50	210.000	10,50
	IMB Kecamatan Karangsambung	1.000.000	1.214.000	565.000	1.779.000	177,90	779.000	77,90
	IMB Kecamatan Kebumen	2.000.000	8.345.600	18.120.000	26.465.600	1.323,28	24.465.600	1.223,28
	IMB Kecamatan Klirong	2.000.000	2.893.600	-	2.893.600	144,68	893.600	44,68
	IMB Kecamatan Kutowinangun	15.000.000	17.201.000	-	17.201.000	114,67	2.201.000	14,67
	IMB Kecamatan Kuwarasan	1.000.000	500.000	-	500.000	50,00	(500.000)	(50,00)

4.1.2.03.03	IMB Kecamatan Mirit	2.000.000	9.128.920	-	9.128.920	456,45	7.128.920	356,45
	IMB Kecamatan Padureso	350.000	268.800	-	268.800	76,80	(81.200)	(23,20)
	IMB Kecamatan Pejagoan	3.000.000	11.081.000	1.219.000	12.300.000	410,00	9.300.000	310,00
	IMB Kecamatan Petanahan	2.000.000	5.358.800	-	5.358.800	267,94	3.358.800	167,94
	IMB Kecamatan Poncowarno	300.000	-	2.315.000	2.315.000	771,67	2.015.000	671,67
	IMB Kecamatan Prembun	500.000	10.802.000	672.000	11.474.000	2.294,80	10.974.000	2.194,80
	IMB Kecamatan Puring	1.800.000	621.000	-	621.000	34,50	(1.179.000)	(65,50)
	IMB Kecamatan Rowokele	1.260.000	737.660	509.000	1.246.660	98,94	(13.340)	(1,06)
	IMB Kecamatan Sadang	2.000.000	-	-	-	-	(2.000.000)	(100,00)
	IMB Kecamatan Sempor	3.000.000	1.304.520	672.000	1.976.520	65,88	(1.023.480)	(34,12)
	IMB Kecamatan Sruweng	6.000.000	1.422.000	865.000	2.287.000	38,12	(3.713.000)	(61,88)
	Retribusi Izin Gangguan	231.175.000	83.482.500	-	83.482.500	36,11	(147.692.500)	(63,89)
	Retribusi Izin Gangguan DPM PTSP	190.000.000	54.625.000	-	54.625.000	28,75	(135.375.000)	(71,25)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Adimulyo	750.000	450.000	-	450.000	60,00	(300.000)	(40,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Alian	600.000	550.000	-	550.000	91,67	(50.000)	(8,33)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Ambal	1.000.000	-	-	-	-	(1.000.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Ayah	2.500.000	1.225.000	-	1.225.000	49,00	(1.275.000)	(51,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Bonorowo	200.000	-	-	-	-	(200.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Buayan	2.000.000	837.500	-	837.500	41,88	(1.162.500)	(58,13)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Bulus Pesantren	2.000.000	-	-	-	-	(2.000.000)	(100,00)

	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Gombang	2.225.000	1.925.000	-	1.925.000	86,52	(300.000)	(13,48)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Karanganyar	700.000	675.000	-	675.000	96,43	(25.000)	(3,57)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Karanggayam	500.000	-	-	-	-	(500.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Karangsambung	500.000	-	-	-	-	(500.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Kebumen	500.000	10.015.000	-	10.015.000	2.003,00	9.515.000	1.903,00
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Klirong	2.000.000	-	-	-	-	(2.000.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Kutowinangun	2.500.000	1.625.000	-	1.625.000	65,00	(875.000)	(35,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Kuwarasan	500.000	-	-	-	-	(500.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Mirit	1.000.000	1.380.000	-	1.380.000	138,00	380.000	38,00
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Padureso	200.000	950.000	-	950.000	475,00	750.000	375,00
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Pejagoan	6.000.000	2.725.000	-	2.725.000	45,42	(3.275.000)	(54,58)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Petanahan	2.000.000	2.050.000	-	2.050.000	102,50	50.000	2,50
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Poncowarno	300.000	-	-	-	-	(300.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Prembun	500.000	1.650.000	-	1.650.000	330,00	1.150.000	230,00
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Puring	1.500.000	350.000	-	350.000	23,33	(1.150.000)	(76,67)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Rowokele	1.200.000	950.000	-	950.000	79,17	(250.000)	(20,83)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Sadang	2.000.000	-	-	-	-	(2.000.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Sempor	2.000.000	-	-	-	-	(2.000.000)	(100,00)
	Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Sruweng	6.000.000	1.500.000	-	1.500.000	25,00	(4.500.000)	(75,00)
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek	57.000.000	54.855.000	1.155.000	56.010.000	98,26	(990.000)	(1,74)

4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.550.875.000	21.901.327.127	-	21.901.327.127	101,63	350.452.127	1,63
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	21.550.875.000	21.901.327.127	-	21.901.327.127	101,63	350.452.127	1,63
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PDAM	921.843.000	945.104.429	-	945.104.429	102,52	23.261.429	2,52
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo	66.649.000	66.662.610	-	66.662.610	100,02	13.610	0,02
4.1.3.01.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR Kebumen	1.099.314.000	1.089.420.562	-	1.089.420.562	99,10	(9.893.438)	(0,90)
4.1.3.01.04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen	2.559.069.000	2.559.069.519	-	2.559.069.519	100,00	519	0,00
4.1.3.01.06	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jateng	16.904.000.000	17.241.070.007	-	17.241.070.007	101,99	337.070.007	1,99
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	320.111.308.000	165.369.594.527	154.275.938.948	319.645.533.475	99,85	(465.774.525)	(0,15)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	234.000.000	385.574.786	42.391.600	427.966.386	182,89	193.966.386	82,89
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	130.000.000	320.280.786	37.516.600	357.797.386	275,23	227.797.386	175,23
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	104.000.000	65.294.000	4.875.000	70.169.000	67,47	(33.831.000)	(32,53)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	2.600.000.000	3.411.572.470	427.751.010	3.839.323.480	147,67	1.239.323.480	47,67
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.300.000.000	3.177.290.130	370.845.840	3.548.135.970	154,27	1.248.135.970	54,27
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	100.000.000	97.139.182	53.044.680	150.183.862	150,18	50.183.862	50,18
4.1.4.02.04	Jasa Giro Dana JKN	200.000.000	137.143.158	3.860.490	141.003.648	70,50	(58.996.352)	(29,50)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	27.500.000.000	20.664.244.138	2.411.702.083	23.075.946.221	83,91	(4.424.053.779)	(16,09)
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank Jateng	24.937.500.000	17.544.336.120	2.145.842.462	19.690.178.582	78,96	(5.247.321.418)	(21,04)
4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada Bank BNI	1.310.000.000	1.178.426.718	98.681.506	1.277.108.224	97,49	(32.891.776)	(2,51)
4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada Bank BRI	1.132.300.000	1.434.393.612	118.849.350	1.553.242.962	137,18	420.942.962	37,18
4.1.4.03.04	Rekening Deposito Pada Bank Mandiri	120.200.000	507.087.688	48.328.765	555.416.453	462,08	435.216.453	362,08

4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	561.396.369	154.367.747	715.764.116	-	715.764.116	(100,00)
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	-	517.052.743	-	517.052.743	-	517.052.743	(100,00)
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	-	44.343.626	154.367.747	198.711.373	-	198.711.373	(100,00)
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	22.646.000	168.747.621	52.164.214	220.911.835	975,50	198.265.835	875,50
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	237.000	1.561.021	-	1.561.021	658,66	1.324.021	558,66
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	105.000	260.480	393.979	654.459	623,29	549.459	523,29
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	87.000	103.000	-	103.000	118,39	16.000	18,39
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	98.000	873.315	-	873.315	891,14	775.315	791,14
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	72.000	71.920	-	71.920	99,89	(80)	(0,11)
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.582.000	1.595.878	-	1.595.878	100,88	13.878	0,88
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20.465.000	164.282.007	51.770.235	216.052.242	1.055,72	195.587.242	955,72
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	308.434.000	457.870.420	36.033.490	493.903.910	160,13	185.469.910	60,13
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Penduduk	300.000.000	445.530.000	35.145.000	480.675.000	160,23	180.675.000	60,23
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	5.434.000	10.036.820	871.690	10.908.510	200,75	5.474.510	100,75
4.1.4.08.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	3.000.000	2.303.600	16.800	2.320.400	77,35	(679.600)	(22,65)
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	290.661.000	2.338.360.419	42.993.304	2.381.353.723	819,29	2.090.692.723	719,29
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	171.559.000	2.139.101.096	7.367.600	2.146.468.696	1.251,15	1.974.909.696	1.151,15
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	119.102.000	199.259.323	35.625.704	234.885.027	197,21	115.783.027	97,21
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	836.100.000	985.096.594	176.306.000	1.161.402.594	138,91	325.302.594	38,91
	Fasilitas Umum (Bid. Aset - BPKAD)	50.000.000	13.500.000	131.400.000	144.900.000	289,80	94.900.000	189,80

	Fasilitas Umum (Dishub)	-	10.600.000	-	10.600.000	-	10.600.000	(100,00)
	Fasilitas Umum (Diskominfo)	160.000.000	137.929.800	22.306.000	160.235.800	100,15	235.800	0,15
	Fasilitas Umum (DISNAKER KUKM)	3.500.000	5.000.000	-	5.000.000	142,86	1.500.000	42,86
	Fasilitas Umum (DISPERMUKLH)	22.600.000	-	22.600.000	22.600.000	100,00	-	-
4.1.4.11.03	Tanah Pertanian Eks Bengkok Kelurahan	600.000.000	818.066.794	-	818.066.794	136,34	218.066.794	36,34
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	163.299.491.000	134.804.644.121	26.911.534.210	161.716.178.331	99,03	(1.583.312.669)	(0,97)
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	163.299.491.000	133.383.310.572	28.332.867.759	161.716.178.331	99,03	(1.583.312.669)	(0,97)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Pengobatan Penyakit Paru	920.000.000	694.538.194	162.507.960	857.046.154	93,16	(62.953.846)	(6,84)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Adimulyo	1.097.061.000	907.923.625	168.270.381	1.076.194.006	98,10	(20.866.994)	(1,90)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Alian	2.385.312.000	2.168.597.641	527.567.720	2.696.165.361	113,03	310.853.361	13,03
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Ambal I	1.437.030.000	1.187.017.453	334.618.275	1.521.635.728	105,89	84.605.728	5,89
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Ambal II	1.040.645.000	762.671.335	156.059.205	918.730.540	88,28	(121.914.460)	(11,72)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Ayah I	1.777.800.000	1.401.338.270	438.958.745	1.840.297.015	103,52	62.497.015	3,52
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Ayah II	899.084.000	754.418.187	185.050.942	939.469.129	104,49	40.385.129	4,49
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Bonorowo	815.712.000	679.736.960	139.815.505	819.552.465	100,47	3.840.465	0,47
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Buayan	1.784.851.000	1.613.842.688	342.738.330	1.956.581.018	109,62	171.730.018	9,62
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Buluspesantren I	1.000.000.000	826.408.567	182.755.505	1.009.164.072	100,92	9.164.072	0,92
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Buluspesantren II	1.120.624.000	856.659.231	186.468.120	1.043.127.351	93,08	(77.496.649)	(6,92)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Gombang I	927.368.000	713.289.012	180.508.228	893.797.240	96,38	(33.570.760)	(3,62)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Gombang II	994.620.000	786.949.673	141.793.550	928.743.223	93,38	(65.876.777)	(6,62)

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Karanganyar	1.584.438.000	1.180.429.887	279.249.910	1.459.679.797	92,13	(124.758.203)	(7,87)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Karanggayam I	1.694.597.000	1.435.014.442	306.233.090	1.741.247.532	102,75	46.650.532	2,75
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Karanggayam II	1.073.452.000	816.639.324	165.142.780	981.782.104	91,46	(91.669.896)	(8,54)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Karangsambung	1.927.919.000	1.767.492.291	354.856.946	2.122.349.237	110,08	194.430.237	10,08
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Kebumen I	1.850.373.000	1.269.839.122	303.842.519	1.573.681.641	85,05	(276.691.359)	(14,95)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Kebumen II	1.644.754.000	1.366.066.168	365.345.110	1.731.411.278	105,27	86.657.278	5,27
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Kebumen III	957.917.000	779.995.789	171.656.320	951.652.109	99,35	(6.264.891)	(0,65)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Klirong I	1.302.000.000	980.612.635	232.008.352	1.212.620.987	93,14	(89.379.013)	(6,86)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Klirong II	944.990.000	751.953.057	156.321.600	908.274.657	96,11	(36.715.343)	(3,89)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Kutowinangun	2.980.137.000	1.881.710.142	468.483.511	2.350.193.653	78,86	(629.943.347)	(21,14)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Kuwarasan	1.949.962.000	1.535.165.108	331.993.210	1.867.158.318	95,75	(82.803.682)	(4,25)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Mirit	1.862.019.000	1.498.024.323	386.868.475	1.884.892.798	101,23	22.873.798	1,23
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Padureso	788.357.000	664.242.019	177.421.260	841.663.279	106,76	53.306.279	6,76
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Pejagoan	2.645.000.000	2.090.909.874	380.880.290	2.471.790.164	93,45	(173.209.836)	(6,55)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Petanahan	2.443.825.000	1.828.895.649	341.893.623	2.170.789.272	88,83	(273.035.728)	(11,17)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Poncowarno	820.994.000	671.379.230	159.957.950	831.337.180	101,26	10.343.180	1,26
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Prembun	924.720.000	821.091.072	178.841.465	999.932.537	108,13	75.212.537	8,13
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Puring	1.815.860.000	1.494.155.423	334.700.870	1.828.856.293	100,72	12.996.293	0,72
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Rowokele	2.107.834.000	1.692.136.867	417.075.190	2.109.212.057	100,07	1.378.057	0,07
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sadang	869.009.000	792.365.537	171.328.420	963.693.957	110,90	94.684.957	10,90

	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sempor I	1.924.732.000	1.555.405.857	318.611.185	1.874.017.042	97,37	(50.714.958)	(2,63)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sempor II	1.095.155.000	859.208.713	167.953.885	1.027.162.598	93,79	(67.992.402)	(6,21)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sruweng	1.698.280.000	1.235.010.360	275.508.770	1.510.519.130	88,94	(187.760.870)	(11,06)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Dr. Soedirman	110.193.060.000	91.062.176.847	18.739.580.562	109.801.757.409	99,64	(391.302.591)	(0,36)
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	-	1.421.333.549	(1.421.333.549)	-	-	-	(100,00)
	Pendapatan Lain-lain BLUD RSUD Dr. Soedirman	-	1.421.333.549	(1.421.333.549)	-	-	-	(100,00)
4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	30.545.000	3.895.000	36.500.000	40.395.000	132,25	9.850.000	32,25
4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	30.545.000	3.895.000	36.500.000	40.395.000	132,25	9.850.000	32,25
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.041.831.000	1.454.132.834	41.815.301	1.495.948.135	143,59	454.117.135	43,59
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	(5.416.722)	(5.416.722)	-	(5.416.722)	(100,00)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	916.531.000	195.765.131	24.721.023	220.486.154	24,06	(696.044.846)	(75,94)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (Temuan Bawas, BPK)	-	1.150.758.688	1.701.000	1.152.459.688	-	1.152.459.688	(100,00)
	Premi Asuransi (Diparbud)	125.300.000	107.609.015	20.810.000	128.419.015	102,49	3.119.015	2,49
4.1.4.25	Dana BOS	123.947.600.000	134.059.755	123.942.379.989	124.076.439.744	100,10	128.839.744	0,10
4.1.4.25.01	Dana BOS	123.947.600.000	134.059.755	123.942.379.989	124.076.439.744	100,10	128.839.744	0,10
4,2	DANA PERIMBANGAN	1.751.748.429.000	1.664.634.132.933	47.785.248.240	1.712.419.381.173	97,75	(39.329.047.827)	(2,25)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.748.191.000	36.611.629.460	3.396.747.490	40.008.376.950	83,79	(7.739.814.050)	(16,21)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	45.196.311.000	35.438.685.998	3.117.186.541	38.555.872.539	85,31	(6.640.438.461)	(14,69)
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	10.919.729.000	8.251.442.582	770.232.700	9.021.675.282	82,62	(1.898.053.718)	(17,38)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	26.533.676.000	20.319.242.545	1.595.389.741	21.914.632.286	82,59	(4.619.043.714)	(17,41)

4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	-	770.232.700	(770.232.700)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.742.906.000	6.097.768.171	1.521.796.800	7.619.564.971	98,41	(123.341.029)	(1,59)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.551.880.000	1.172.943.462	279.560.949	1.452.504.411	56,92	(1.099.375.589)	(43,08)
4.2.1.02.01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	41.202.000	-	-	-	-	(41.202.000)	(100,00)
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	322.269.000	395.166.189	(57.745.288)	337.420.901	104,70	15.151.901	4,70
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	8.133.000	10.131.300	(10.131.300)	-	-	(8.133.000)	(100,00)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	411.000	-	-	-	-	(411.000)	(100,00)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000	223.968.600	301.603.527	525.572.127	35,20	(967.551.873)	(64,80)
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	128.329.000	30.278.848	-	30.278.848	23,59	(98.050.152)	(76,41)
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	513.252.000	480.660.548	-	480.660.548	93,65	(32.591.452)	(6,35)
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	37.798.000	27.697.082	43.440.086	71.137.168	188,20	33.339.168	88,20
4.2.1.02.12	Bagi Hasil SDA Mineral Batubara	7.362.000	5.040.895	2.393.924	7.434.819	100,99	72.819	0,99
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	-	1.234.003.169.000	100,00	-	-
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	-	1.234.003.169.000	100,00	-	-
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	-	1.234.003.169.000	100,00	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	469.997.069.000	394.019.334.473	44.388.500.750	438.407.835.223	93,28	(31.589.233.777)	(6,72)
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	18.641.000.000	14.913.117.000	1.814.837.000	16.727.954.000	89,74	(1.913.046.000)	(10,26)
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB	18.641.000.000	14.913.117.000	1.814.837.000	16.727.954.000	89,74	(1.913.046.000)	(10,26)
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB	37.475.000.000	29.979.741.000	-	29.979.741.000	80,00	(7.495.259.000)	(20,00)
4.2.3.02.01	Pelayanan Dasar	2.000.000.000	1.600.000.000	-	1.600.000.000	80,00	(400.000.000)	(20,00)

4.2.3.02.02	Pelayanan Rujukan	23.125.000.000	18.500.000.000	-	18.500.000.000	80,00	(4.625.000.000)	(20,00)
4.2.3.02.03	Pelayanan Kefarmasian	11.509.000.000	9.207.101.000	-	9.207.101.000	80,00	(2.301.899.000)	(20,00)
4.2.3.02.04	Keluarga Berencana	841.000.000	672.640.000	-	672.640.000	79,98	(168.360.000)	(20,02)
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	6.445.000.000	5.156.156.000	147.998.000	5.304.154.000	82,30	(1.140.846.000)	(17,70)
4.2.3.03.01	Air Minum	3.501.000.000	2.800.921.000	147.998.000	2.948.919.000	84,23	(552.081.000)	(15,77)
4.2.3.03.02	Sanitasi	2.944.000.000	2.355.235.000	-	2.355.235.000	80,00	(588.765.000)	(20,00)
4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan	4.235.000.000	5.473.150.000	(1.250.000.000)	4.223.150.000	99,72	(11.850.000)	(0,28)
4.2.3.04.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.04.02	Pertanian	4.235.000.000	4.223.150.000	-	4.223.150.000	99,72	(11.850.000)	(0,28)
4.2.3.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan	1.757.000.000	1.405.668.000	-	1.405.668.000	80,00	(351.332.000)	(20,00)
4.2.3.06.01	Kelautan dan Perikanan	1.757.000.000	1.405.668.000	-	1.405.668.000	80,00	(351.332.000)	(20,00)
4.2.3.10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	3.180.000.000	2.543.744.000	-	2.543.744.000	79,99	(636.256.000)	(20,01)
4.2.3.10.01	Sarana Perdagangan	3.180.000.000	2.543.744.000	-	2.543.744.000	79,99	(636.256.000)	(20,01)
4.2.3.11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang	28.636.000.000	21.659.139.000	1.250.000.000	22.909.139.000	80,00	(5.726.861.000)	(20,00)
4.2.3.11.01	Jalan	23.636.000.000	18.909.139.000	-	18.909.139.000	80,00	(4.726.861.000)	(20,00)
4.2.3.11.02	Sarpras Irigasi dan Air Minum	5.000.000.000	2.750.000.000	1.250.000.000	4.000.000.000	80,00	(1.000.000.000)	(20,00)
4.2.3.14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	328.590.335.000	308.331.061.473	5.974.989.750	314.306.051.223	95,65	(14.284.283.777)	(4,35)
4.2.3.14.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	328.590.335.000	308.331.061.473	5.974.989.750	314.306.051.223	95,65	(14.284.283.777)	(4,35)
4.2.3.15	Dana Alokasi Khusus Tambahan	35.340.734.000	-	35.340.734.000	35.340.734.000	100,00	-	-
4.2.3.15.01	Jalan/Jembatan	35.340.734.000	-	35.340.734.000	35.340.734.000	100,00	-	-

4.2.3.16	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Pemukiman	5.697.000.000	4.557.558.000	1.109.942.000	5.667.500.000	99,48	(29.500.000)	(0,52)
4.2.3.16.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Pemukiman	5.697.000.000	4.557.558.000	1.109.942.000	5.667.500.000	99,48	(29.500.000)	(0,52)
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	550.225.854.000	510.012.041.481	47.073.112.562	557.085.154.043	101,25	6.859.300.043	1,25
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.500.000.000	-	5.214.000.000	5.214.000.000	347,60	3.714.000.000	247,60
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.500.000.000	-	5.214.000.000	5.214.000.000	347,60	3.714.000.000	247,60
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.500.000.000	-	5.214.000.000	5.214.000.000	347,60	3.714.000.000	247,60
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	116.348.491.000	95.417.517.881	33.704.252.362	129.121.770.243	110,98	12.773.279.243	10,98
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	116.348.491.000	95.417.517.881	33.704.252.362	129.121.770.243	110,98	12.773.279.243	10,98
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	26.423.742.000	20.337.595.899	9.932.241.650	30.269.837.549	114,56	3.846.095.549	14,56
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.911.888.000	15.731.228.373	6.971.789.588	22.703.017.961	103,61	791.129.961	3,61
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.240.760.000	20.816.419.763	7.915.985.223	28.732.404.986	113,83	3.491.644.986	13,83
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	237.213.000	257.445.162	73.459.770	330.904.932	139,50	93.691.932	39,50
4.3.3.01.08	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	42.534.888.000	38.274.828.684	8.810.776.131	47.085.604.815	110,70	4.550.716.815	10,70
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.141.752.000	51.141.752.000	-	51.141.752.000	100,00	-	-
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	51.141.752.000	51.141.752.000	-	51.141.752.000	100,00	-	-
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	51.141.752.000	51.141.752.000	-	51.141.752.000	100,00	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.237.550.000	3.713.519.800	8.154.860.200	11.868.380.000	55,88	(9.369.170.000)	(44,12)
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	21.237.550.000	3.713.519.800	8.154.860.200	11.868.380.000	55,88	(9.369.170.000)	(44,12)
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	21.237.550.000	3.713.519.800	8.154.860.200	11.868.380.000	55,88	(9.369.170.000)	(44,12)
4.3.6	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	359.998.061.000	359.739.251.800	-	359.739.251.800	99,93	(258.809.200)	(0,07)

4.3.6.01	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	359.998.061.000	359.739.251.800	-	359.739.251.800	99,93	(258.809.200)	(0,07)
4.3.6.01.01	Dana Desa	359.998.061.000	359.739.251.800	-	359.739.251.800	99,93	(258.809.200)	(0,07)
	JUMLAH SELURUH PENDAPATAN DAERAH	2.739.317.507.000	2.453.847.880.599	259.169.192.807	2.713.017.073.406	99,04	(26.300.433.594)	(0,96)

Kebumen, 27 Februari 2018
An. BUPATI KEBUMEN
Plh. SEKRETARIS DAERAH
Inspektur

Drs. H. Mahmud Fauzi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610109 199102 1 002



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN BULAN DESEMBER 2018

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH KURANG / LEBIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN	2.636.961.029.000,00	2.417.987.091.377,00	221.914.672.420,38	2.639.901.763.797,38	100,11	2.940.734.797,38	0,11
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.092.341.000,00	305.386.858.296,00	46.747.133.385,38	352.133.991.681,38	96,72	(11.958.349.318,62)	(3,28)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	90.126.000.000,00	88.971.852.891,00	7.803.740.211,00	96.775.593.102,00	107,38	6.649.593.102,00	7,38
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.600.000.000,00	1.321.604.980,00	144.509.997,00	1.466.114.977,00	91,63	(133.885.023,00)	(8,37)
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.000.000.000,00	913.697.593,00	104.069.211,00	1.017.766.804,00	101,78	17.766.804,00	1,78
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	400.000.000,00	232.914.913,00	20.853.286,00	253.768.199,00	63,44	(146.231.801,00)	(36,56)
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	100.000.000,00	93.968.600,00	8.977.500,00	102.946.100,00	102,95	2.946.100,00	2,95
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	39.028.374,00	5.185.000,00	44.213.374,00	88,43	(5.786.626,00)	(11,57)
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	50.000.000,00	41.995.500,00	5.425.000,00	47.420.500,00	94,84	(2.579.500,00)	(5,16)
4.1.1.02	Pajak Restoran	5.000.000.000,00	4.543.207.844,00	1.303.985.673,00	5.847.193.517,00	116,94	847.193.517,00	16,94
4.1.1.02.02	Rumah Makan	850.000.000,00	834.386.564,00	80.373.002,00	914.759.566,00	107,62	64.759.566,00	7,62
4.1.1.02.05	Katering/Jasa Boga	4.150.000.000,00	3.708.821.280,00	1.223.612.671,00	4.932.433.951,00	118,85	782.433.951,00	18,85
4.1.1.03	Pajak Hiburan	165.000.000,00	148.682.500,00	9.136.595,00	157.819.095,00	95,65	(7.180.905,00)	(4,35)
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000,00	4.700.000,00	-	4.700.000,00	235,00	2.700.000,00	135,00
4.1.1.03.07	Karaoke	60.000.000,00	55.450.000,00	5.500.000,00	60.950.000,00	101,58	950.000,00	1,58

4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	70.400.000,00	55.382.500,00	1.846.595,00	57.229.095,00	81,29	(13.170.905,00)	(18,71)
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	17.000.000,00	15.050.000,00	1.490.000,00	16.540.000,00	97,29	(460.000,00)	(2,71)
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	15.600.000,00	18.100.000,00	300.000,00	18.400.000,00	117,95	2.800.000,00	17,95
4.1.1.04	Pajak Reklame	900.000.000,00	672.599.748,00	148.830.005,00	821.429.753,00	91,27	(78.570.247,00)	(8,73)
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	500.000.000,00	377.142.128,00	127.707.305,00	504.849.433,00	100,97	4.849.433,00	0,97
4.1.1.04.02	Reklame Kain	400.000.000,00	295.457.620,00	21.122.700,00	316.580.320,00	79,15	(83.419.680,00)	(20,85)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	29.500.000.000,00	27.673.612.174,00	2.645.578.666,00	30.319.190.840,00	102,78	819.190.840,00	2,78
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	29.500.000.000,00	27.673.612.174,00	2.645.578.666,00	30.319.190.840,00	102,78	819.190.840,00	2,78
	PPJ PLN Area Cilacap	29.400.000.000,00	27.569.036.489,00	2.635.997.889,00	30.205.034.378,00	102,74	805.034.378,00	2,74
	PPJ PLN Area Purwokerto	100.000.000,00	104.575.685,00	9.580.777,00	114.156.462,00	114,16	14.156.462,00	14,16
4.1.1.07	Pajak Parkir	200.000.000,00	227.748.410,00	16.602.000,00	244.350.410,00	122,18	44.350.410,00	22,18
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	200.000.000,00	227.748.410,00	16.602.000,00	244.350.410,00	122,18	44.350.410,00	22,18
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	209.512.513,00	17.104.985,00	226.617.498,00	113,31	26.617.498,00	13,31
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	209.512.513,00	17.104.985,00	226.617.498,00	113,31	26.617.498,00	13,31
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	9.350.000,00	-	9.350.000,00	93,50	(650.000,00)	(6,50)
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	9.350.000,00	-	9.350.000,00	93,50	(650.000,00)	(6,50)
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	3.326.239.499,00	1.998.621.275,00	5.324.860.774,00	177,50	2.324.860.774,00	77,50
4.1.1.11.04	Batu Kapur	40.000.000,00	37.471.888,00	3.763.372,00	41.235.260,00	103,09	1.235.260,00	3,09
4.1.1.11.06	Batu Gunung/Kali	1.470.000.000,00	1.942.756.045,00	1.071.553.626,00	3.014.309.671,00	205,06	1.544.309.671,00	105,06

4.1.1.11.23	Pasir dan kerikil	1.238.000.000,00	1.185.821.236,00	797.301.310,00	1.983.122.546,00	160,19	745.122.546,00	60,19
4.1.1.11.29	Tanah Timbun	252.000.000,00	160.190.330,00	126.002.967,00	286.193.297,00	113,57	34.193.297,00	13,57
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.000.000.000,00	41.784.013.122,00	464.598.648,00	42.248.611.770,00	103,05	1.248.611.770,00	3,05
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.000.000.000,00	41.784.013.122,00	464.598.648,00	42.248.611.770,00	103,05	1.248.611.770,00	3,05
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.551.000.000,00	9.055.282.101,00	1.054.772.367,00	10.110.054.468,00	118,23	1.559.054.468,00	18,23
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.551.000.000,00	9.055.282.101,00	1.054.772.367,00	10.110.054.468,00	118,23	1.559.054.468,00	18,23
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	48.378.072.000,00	33.229.344.863,00	4.279.448.910,00	37.508.793.773,00	77,53	(10.869.278.227,00)	(22,47)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	32.766.744.000,00	17.806.895.243,00	1.984.100.625,00	19.790.995.868,00	60,40	(12.975.748.132,00)	(39,60)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.200.000.000,00	11.698.407.543,00	1.232.537.975,00	12.930.945.518,00	51,31	(12.269.054.482,00)	(48,69)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan (DINKES)	200.000.000,00	162.507.500,00	18.267.000,00	180.774.500,00	90,39	(19.225.500,00)	(9,61)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Prembun)	25.000.000.000,00	11.535.900.043,00	1.214.270.975,00	12.750.171.018,00	51,00	(12.249.828.982,00)	(49,00)
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	870.120.000,00	745.989.200,00	86.057.000,00	832.046.200,00	95,62	(38.073.800,00)	(4,38)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISHUB)	60.120.000,00	43.232.000,00	6.085.000,00	49.317.000,00	82,03	(10.803.000,00)	(17,97)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISPERINDAG)	330.000.000,00	293.643.400,00	30.302.000,00	323.945.400,00	98,17	(6.054.600,00)	(1,83)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISPERKIM LH)	450.000.000,00	375.811.500,00	48.017.000,00	423.828.500,00	94,18	(26.171.500,00)	(5,82)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISPORAWISATA)	30.000.000,00	33.302.300,00	1.653.000,00	34.955.300,00	116,52	4.955.300,00	16,52
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	660.678.000,00	98.857.000,00	759.535.000,00	75,95	(240.465.000,00)	(24,05)
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar	4.320.600.000,00	3.465.422.000,00	384.983.650,00	3.850.405.650,00	89,12	(470.194.350,00)	(10,88)
4.1.2.01.23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	679.000.000,00	608.358.500,00	44.177.000,00	652.535.500,00	96,10	(26.464.500,00)	(3,90)

4.1.2.01.43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	78.400.000,00	56.672.000,00	4.312.000,00	60.984.000,00	77,79	(17.416.000,00)	(22,21)
4.1.2.01.45	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	618.624.000,00	571.368.000,00	133.176.000,00	704.544.000,00	113,89	85.920.000,00	13,89
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	13.231.149.000,00	14.051.586.150,00	2.156.565.875,00	16.208.152.025,00	122,50	2.977.003.025,00	22,50
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.245.429.000,00	1.765.531.950,00	588.654.225,00	2.354.186.175,00	104,84	108.757.175,00	4,84
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BAPPENDA)	23.749.000,00	-	-	-	-	(23.749.000,00)	(100,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BID. ASET - BPKAD)	150.000.000,00	148.871.650,00	95.167.625,00	244.039.275,00	162,69	94.039.275,00	62,69
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DINLUTKAN)	269.000.000,00	46.520.000,00	186.415.000,00	232.935.000,00	86,59	(36.065.000,00)	(13,41)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISHUB)	72.980.000,00	56.536.000,00	122.334.000,00	178.870.000,00	245,09	105.890.000,00	145,09
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISNAKER KUKM)	29.000.000,00	43.629.000,00	9.606.000,00	53.235.000,00	183,57	24.235.000,00	83,57
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISPERINDAG)	-	8.760.000,00	-	8.760.000,00	-	8.760.000,00	(100,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISPORAWISATA)	350.000.000,00	364.617.800,00	47.080.600,00	411.698.400,00	117,63	61.698.400,00	17,63
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISTAPANG)	26.600.000,00	51.993.500,00	825.000,00	52.818.500,00	198,57	26.218.500,00	98,57
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPM PTSP)	199.100.000,00	199.411.500,00	1.250.000,00	200.661.500,00	100,78	1.561.500,00	0,78
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPU PR)	874.000.000,00	675.600.000,00	81.700.000,00	757.300.000,00	86,65	(116.700.000,00)	(13,35)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kecamatan Karanganyar)	-	3.012.500,00	-	3.012.500,00	-	3.012.500,00	(100,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kecamatan Sempor)	-	360.000,00	-	360.000,00	-	360.000,00	(100,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kelurahan Kebumen)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00	-	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (SETDA BAG. UMUM)	250.000.000,00	165.220.000,00	44.276.000,00	209.496.000,00	83,80	(40.504.000,00)	(16,20)
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	1.300.000.000,00	1.338.048.800,00	390.787.450,00	1.728.836.250,00	132,99	428.836.250,00	32,99

4.1.2.02.13	Retribusi Terminal	180.000.000,00	150.693.400,00	19.009.100,00	169.702.500,00	94,28	(10.297.500,00)	(5,72)
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.818.000.000,00	2.865.710.500,00	275.449.500,00	3.141.160.000,00	111,47	323.160.000,00	11,47
	Retribusi Tempat Khusus Parkir (DISPERINDAG)	2.208.000.000,00	2.301.641.500,00	215.708.500,00	2.517.350.000,00	114,01	309.350.000,00	14,01
	Retribusi Tempat Khusus Parkir (DISPORAWISATA)	610.000.000,00	564.069.000,00	59.741.000,00	623.810.000,00	102,26	13.810.000,00	2,26
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2.720.000,00	1.940.000,00	360.000,00	2.300.000,00	84,56	(420.000,00)	(15,44)
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.500.000.000,00	7.630.316.500,00	846.223.100,00	8.476.539.600,00	130,41	1.976.539.600,00	30,41
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	165.000.000,00	267.352.500,00	33.170.000,00	300.522.500,00	182,13	135.522.500,00	82,13
4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	31.992.500,00	2.912.500,00	34.905.000,00	174,53	14.905.000,00	74,53
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.380.179.000,00	1.370.863.470,00	138.782.410,00	1.509.645.880,00	63,43	(870.533.120,00)	(36,57)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.320.179.000,00	1.331.743.470,00	130.612.410,00	1.462.355.880,00	63,03	(857.823.120,00)	(36,97)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (DPU PR)	2.150.000.000,00	1.234.210.650,00	94.575.700,00	1.328.786.350,00	61,80	(821.213.650,00)	(38,20)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Adimulyo)	7.000.000,00	6.978.000,00	-	6.978.000,00	99,69	(22.000,00)	(0,31)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Alian)	6.000.000,00	-	1.659.000,00	1.659.000,00	27,65	(4.341.000,00)	(72,35)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Ambal)	5.000.000,00	-	691.000,00	691.000,00	13,82	(4.309.000,00)	(86,18)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Ayah)	10.000.000,00	5.050.000,00	-	5.050.000,00	50,50	(4.950.000,00)	(49,50)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Bonorowo)	2.500.000,00	2.787.000,00	-	2.787.000,00	111,48	287.000,00	11,48
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Buayan)	4.000.000,00	963.900,00	4.604.800,00	5.568.700,00	139,22	1.568.700,00	39,22
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Buluspesantren)	2.000.000,00	425.000,00	2.335.000,00	2.760.000,00	138,00	760.000,00	38,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Gombong)	17.100.000,00	20.341.500,00	2.335.000,00	22.676.500,00	132,61	5.576.500,00	32,61

	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Karanganyar)	10.000.000,00	2.799.300,00	-	2.799.300,00	27,99	(7.200.700,00)	(72,01)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Karanggayam)	3.000.000,00	2.782.000,00	-	2.782.000,00	92,73	(218.000,00)	(7,27)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Karangsambung)	1.779.000,00	1.518.600,00	635.000,00	2.153.600,00	121,06	374.600,00	21,06
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Kebumen)	27.000.000,00	12.691.000,00	20.424.910,00	33.115.910,00	122,65	6.115.910,00	22,65
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Klirong)	3.000.000,00	4.404.000,00	461.000,00	4.865.000,00	162,17	1.865.000,00	62,17
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Kutowinangun)	15.500.000,00	6.264.880,00	-	6.264.880,00	40,42	(9.235.120,00)	(59,58)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Kuwarasan)	500.000,00	-	-	-	-	(500.000,00)	(100,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Mirit)	10.000.000,00	-	-	-	-	(10.000.000,00)	(100,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Padureso)	1.500.000,00	868.250,00	-	868.250,00	57,88	(631.750,00)	(42,12)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Pejagoan)	7.000.000,00	2.920.000,00	1.931.000,00	4.851.000,00	69,30	(2.149.000,00)	(30,70)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Petanahan)	5.000.000,00	4.647.000,00	-	4.647.000,00	92,94	(353.000,00)	(7,06)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Poncowarno)	2.500.000,00	656.000,00	-	656.000,00	26,24	(1.844.000,00)	(73,76)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Prembun)	7.000.000,00	6.580.000,00	-	6.580.000,00	94,00	(420.000,00)	(6,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Puring)	1.800.000,00	1.390.000,00	-	1.390.000,00	77,22	(410.000,00)	(22,78)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Rowokele)	3.500.000,00	3.425.100,00	-	3.425.100,00	97,86	(74.900,00)	(2,14)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Sadang)	2.000.000,00	-	960.000,00	960.000,00	48,00	(1.040.000,00)	(52,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Sempor)	3.000.000,00	4.997.790,00	-	4.997.790,00	166,59	1.997.790,00	66,59
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Sruweng)	12.500.000,00	5.043.500,00	-	5.043.500,00	40,35	(7.456.500,00)	(59,65)
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek	60.000.000,00	39.120.000,00	8.170.000,00	47.290.000,00	78,82	(12.710.000,00)	(21,18)

4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.629.329.000,00	9.734.494.832,00	-	9.734.494.832,00	101,09	105.165.832,00	1,09
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.629.329.000,00	9.734.494.832,00	-	9.734.494.832,00	101,09	105.165.832,00	1,09
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PDAM	1.051.649.000,00	1.156.814.410,00	-	1.156.814.410,00	110,00	105.165.410,00	10,00
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo	100.124.000,00	100.124.278,00	-	100.124.278,00	100,00	278,00	0,00
4.1.3.01.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR Kebumen	779.697.000,00	779.696.827,00	-	779.696.827,00	100,00	(173,00)	(0,00)
4.1.3.01.04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen	2.759.341.000,00	2.759.340.653,00	-	2.759.340.653,00	100,00	(347,00)	(0,00)
4.1.3.01.06	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jateng	4.938.518.000,00	4.938.518.664,00	-	4.938.518.664,00	100,00	664,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215.958.940.000,00	173.451.165.710,00	34.663.944.264,38	208.115.109.974,38	96,37	(7.843.830.025,62)	(3,63)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	513.750.000,00	827.279.553,00	167.917.800,00	995.197.353,00	193,71	481.447.353,00	93,71
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	15.000.000,00	15.927.200,00	-	15.927.200,00	106,18	927.200,00	6,18
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	60.000.000,00	51.058.299,00	29.736.912,00	80.795.211,00	134,66	20.795.211,00	34,66
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	60.000.000,00	-	74.683.888,00	74.683.888,00	124,47	14.683.888,00	24,47
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	318.750.000,00	696.991.554,00	53.497.000,00	750.488.554,00	235,45	431.738.554,00	135,45
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	60.000.000,00	63.302.500,00	10.000.000,00	73.302.500,00	122,17	13.302.500,00	22,17
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	4.003.691.458,00	598.205.742,00	4.601.897.200,00	131,48	1.101.897.200,00	31,48
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	3.814.032.539,00	456.584.585,00	4.270.617.124,00	122,02	770.617.124,00	22,02
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	-	184.629.784,00	141.621.157,00	326.250.941,00	-	326.250.941,00	(100,00)
4.1.4.02.04	Jasa Giro Dana JKN	-	5.029.135,00	-	5.029.135,00	-	5.029.135,00	(100,00)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	23.400.000.000,00	18.910.274.021,00	842.482.259,00	19.752.756.280,00	84,41	(3.647.243.720,00)	(15,59)

4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank Jateng	20.014.234.000,00	16.336.928.390,00	608.321.914,00	16.945.250.304,00	84,67	(3.068.983.696,00)	(15,33)
4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada Bank BNI	1.277.108.000,00	692.107.552,00	43.705.480,00	735.813.032,00	57,62	(541.294.968,00)	(42,38)
4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada Bank BRI	1.553.242.000,00	1.417.581.934,00	164.811.030,00	1.582.392.964,00	101,88	29.150.964,00	1,88
4.1.4.03.04	Rekening Deposito Pada Bank Mandiri	555.416.000,00	463.656.145,00	25.643.835,00	489.299.980,00	88,10	(66.116.020,00)	(11,90)
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	190.607.419,00	396.740.955,00	587.348.374,00	-	587.348.374,00	(100,00)
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	-	413.570,00	6.779.421,00	7.192.991,00	-	7.192.991,00	(100,00)
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	-	4.748.000,00	10.868.467,00	15.616.467,00	-	15.616.467,00	(100,00)
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	-	183.457.049,00	362.539.812,00	545.996.861,00	-	545.996.861,00	(100,00)
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	-	-	317.900,00	317.900,00	-	317.900,00	(100,00)
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup	-	1.988.800,00	16.235.355,00	18.224.155,00	-	18.224.155,00	(100,00)
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	232.315.000,00	295.987.443,00	28.931.093,00	324.918.536,00	139,86	92.603.536,00	39,86
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.725.000,00	1.951.017,00	-	1.951.017,00	71,60	(773.983,00)	(28,40)
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	260.000,00	49.336,00	58.400,00	107.736,00	41,44	(152.264,00)	(58,56)
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	128.000,00	2.000,00	-	2.000,00	1,56	(126.000,00)	(98,44)
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	880.000,00	138.053,00	-	138.053,00	15,69	(741.947,00)	(84,31)
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	72.000,00	397.696,00	-	397.696,00	552,36	325.696,00	452,36
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.600.000,00	100.298,00	-	100.298,00	6,27	(1.499.702,00)	(93,73)
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	47.821.392,00	-	47.821.392,00	-	47.821.392,00	(100,00)
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	226.650.000,00	245.527.651,00	28.872.693,00	274.400.344,00	121,07	47.750.344,00	21,07

4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	413.000.000,00	482.075.660,00	35.171.010,00	517.246.670,00	125,24	104.246.670,00	25,24
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Penduduk	400.000.000,00	470.630.000,00	33.790.000,00	504.420.000,00	126,11	104.420.000,00	26,11
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.425.860,00	1.077.410,00	11.503.270,00	115,03	1.503.270,00	15,03
4.1.4.08.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	3.000.000,00	1.019.800,00	303.600,00	1.323.400,00	44,11	(1.676.600,00)	(55,89)
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	230.877.000,00	230.877.650,00	114.948.000,00	345.825.650,00	149,79	114.948.650,00	49,79
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	2.500.000.000,00	2.670.953.673,00	(756.876.116,00)	1.914.077.557,00	76,56	(585.922.443,00)	(23,44)
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	2.250.000.000,00	2.367.840.956,00	(776.508.776,00)	1.591.332.180,00	70,73	(658.667.820,00)	(29,27)
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	303.112.717,00	19.632.660,00	322.745.377,00	129,10	72.745.377,00	29,10
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.024.845.000,00	1.064.926.560,00	40.038.602,00	1.104.965.162,00	107,82	80.120.162,00	7,82
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	204.845.000,00	254.708.572,00	35.164.872,00	289.873.444,00	141,51	85.028.444,00	41,51
	Fasilitas Umum (BID. ASET - BPKAD)	14.000.000,00	27.000.000,00	-	27.000.000,00	192,86	13.000.000,00	92,86
	Fasilitas Umum (DISHUB)	24.000.000,00	20.450.000,00	9.500.000,00	29.950.000,00	124,79	5.950.000,00	24,79
	Fasilitas Umum (DISKOMINFO)	161.845.000,00	188.008.572,00	25.664.872,00	213.673.444,00	132,02	51.828.444,00	32,02
	Fasilitas Umum (DISNAKER KUKM)	5.000.000,00	19.250.000,00	-	19.250.000,00	385,00	14.250.000,00	285,00
4.1.4.11.03	Tanah Pertanian Eks Bengkok Kelurahan	820.000.000,00	810.217.988,00	4.873.730,00	815.091.718,00	99,40	(4.908.282,00)	(0,60)
	Tanah Pertanian Eks Bengkok Kelurahan (Bid. Aset BPKAD)	820.000.000,00	810.217.988,00	4.873.730,00	815.091.718,00	99,40	(4.908.282,00)	(0,60)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	182.012.878.000,00	142.610.337.719,00	33.066.568.214,00	175.676.905.933,00	96,52	(6.335.972.067,00)	(3,48)
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	180.273.878.000,00	140.949.543.861,00	32.662.966.963,00	173.612.510.824,00	96,30	(6.661.367.176,00)	(3,70)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Pengobatan Penyakit Paru)	950.000.000,00	669.923.616,00	46.267.440,00	716.191.056,00	75,39	(233.808.944,00)	(24,61)

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Adimulyo)	1.381.738.000,00	1.205.972.502,00	232.720.711,00	1.438.693.213,00	104,12	56.955.213,00	4,12
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Alian)	2.987.831.000,00	2.891.864.839,00	557.486.024,00	3.449.350.863,00	115,45	461.519.863,00	15,45
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Ambal I)	1.793.346.000,00	1.644.786.875,00	336.492.698,00	1.981.279.573,00	110,48	187.933.573,00	10,48
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Ambal II)	1.143.270.000,00	1.001.157.038,00	241.412.795,00	1.242.569.833,00	108,69	99.299.833,00	8,69
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Ayah I)	2.219.025.000,00	1.505.229.770,00	314.575.828,00	1.819.805.598,00	82,01	(399.219.402,00)	(17,99)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Ayah II)	1.181.395.000,00	980.213.684,00	215.100.995,00	1.195.314.679,00	101,18	13.919.679,00	1,18
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Bonorowo)	1.121.035.000,00	956.257.636,00	151.140.325,00	1.107.397.961,00	98,78	(13.637.039,00)	(1,22)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Buayan)	1.889.692.000,00	1.898.966.081,00	365.200.112,00	2.264.166.193,00	119,82	374.474.193,00	19,82
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Buluspesantren I)	1.403.385.000,00	1.187.166.072,00	236.070.591,00	1.423.236.663,00	101,41	19.851.663,00	1,41
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Buluspesantren II)	1.279.857.000,00	1.028.110.225,00	197.020.589,00	1.225.130.814,00	95,72	(54.726.186,00)	(4,28)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Gombong I)	1.182.553.000,00	1.099.520.531,00	222.396.438,00	1.321.916.969,00	111,79	139.363.969,00	11,79
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Gombong II)	1.121.619.000,00	932.772.684,00	190.527.385,00	1.123.300.069,00	100,15	1.681.069,00	0,15
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Karanganyar)	2.221.386.000,00	1.787.211.890,00	330.347.454,00	2.117.559.344,00	95,33	(103.826.656,00)	(4,67)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Karanggayam I)	2.050.464.000,00	1.635.380.782,00	313.033.098,00	1.948.413.880,00	95,02	(102.050.120,00)	(4,98)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Karanggayam II)	1.187.902.000,00	873.361.985,00	175.689.042,00	1.049.051.027,00	88,31	(138.850.973,00)	(11,69)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Karangsambung)	2.347.733.000,00	2.068.954.210,00	436.072.030,00	2.505.026.240,00	106,70	157.293.240,00	6,70
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kebumen I)	2.325.583.000,00	1.847.473.377,00	414.126.261,00	2.261.599.638,00	97,25	(63.983.362,00)	(2,75)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kebumen II)	2.240.322.000,00	1.815.888.533,00	385.767.791,00	2.201.656.324,00	98,27	(38.665.676,00)	(1,73)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kebumen III)	1.179.688.000,00	1.073.209.415,00	226.308.035,00	1.299.517.450,00	110,16	119.829.450,00	10,16

	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Klirong I)	1.728.577.000,00	1.484.222.278,00	296.126.390,00	1.780.348.668,00	103,00	51.771.668,00	3,00
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Klirong II)	1.023.965.000,00	887.476.855,00	193.773.295,00	1.081.250.150,00	105,59	57.285.150,00	5,59
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kutowinangun)	2.661.384.000,00	2.367.900.323,00	561.254.576,00	2.929.154.899,00	110,06	267.770.899,00	10,06
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kuwarasan)	2.124.277.000,00	1.865.380.361,00	391.884.771,00	2.257.265.132,00	106,26	132.988.132,00	6,26
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Mirit)	2.398.791.000,00	2.184.836.360,00	409.588.626,00	2.594.424.986,00	108,16	195.633.986,00	8,16
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Padureso)	1.074.551.000,00	866.854.355,00	180.728.012,00	1.047.582.367,00	97,49	(26.968.633,00)	(2,51)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Pejagoan)	3.016.502.000,00	2.508.790.323,00	515.112.274,00	3.023.902.597,00	100,25	7.400.597,00	0,25
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Petanahan)	2.550.973.000,00	2.226.608.997,00	436.106.680,00	2.662.715.677,00	104,38	111.742.677,00	4,38
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Poncowarno)	959.645.000,00	809.270.048,00	167.564.356,00	976.834.404,00	101,79	17.189.404,00	1,79
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Prembun)	966.759.000,00	789.525.846,00	167.940.913,00	957.466.759,00	99,04	(9.292.241,00)	(0,96)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Puring)	1.806.587.000,00	1.671.681.385,00	349.380.782,00	2.021.062.167,00	111,87	214.475.167,00	11,87
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Rowokele)	2.488.424.000,00	1.959.768.954,00	403.569.984,00	2.363.338.938,00	94,97	(125.085.062,00)	(5,03)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Sadang)	1.073.640.000,00	861.217.374,00	166.056.299,00	1.027.273.673,00	95,68	(46.366.327,00)	(4,32)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Sempor I)	1.953.710.000,00	1.683.882.421,00	316.432.121,00	2.000.314.542,00	102,39	46.604.542,00	2,39
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Sempor II)	1.116.390.000,00	900.043.967,00	189.464.240,00	1.089.508.207,00	97,59	(26.881.793,00)	(2,41)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Sruweng)	1.860.879.000,00	1.636.254.066,00	346.227.199,00	1.982.481.265,00	106,53	121.602.265,00	6,53
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD Soedirman)	118.261.000.000,00	88.142.408.203,00	21.984.000.803,00	110.126.409.006,00	93,12	(8.134.590.994,00)	(6,88)
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.739.000.000,00	1.660.793.858,00	403.601.251,00	2.064.395.109,00	118,71	325.395.109,00	18,71
4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	50.000.000,00	18.550.000,00	34.225.000,00	52.775.000,00	105,55	2.775.000,00	5,55

4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	50.000.000,00	18.550.000,00	34.225.000,00	52.775.000,00	105,55	2.775.000,00	5,55
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.081.275.000,00	2.145.604.554,00	95.591.705,38	2.241.196.259,38	107,68	159.921.259,38	7,68
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.081.275.000,00	2.145.604.554,00	95.591.705,38	2.241.196.259,38	107,68	159.921.259,38	7,68
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (BID. ASET - BPKAD)	1.900.000.000,00	246.213.997,00	82.159.557,38	328.373.554,38	17,28	(1.571.626.445,62)	(82,72)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (BID. ASET - BPKAD, TEMUAN BAWAS, BPK)	-	1.739.447.974,00	7.783.348,00	1.747.231.322,00	-	1.747.231.322,00	(100,00)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (DISPORAWISATA)	144.095.000,00	123.813.850,00	-	123.813.850,00	85,93	(20.281.150,00)	(14,07)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (RSUD Prembun)	37.180.000,00	36.128.733,00	5.648.800,00	41.777.533,00	112,37	4.597.533,00	12,37
4,2	DANA PERIMBANGAN	1.664.856.587.000,00	1.638.002.152.692,00	16.133.151.214,00	1.654.135.303.906,00	99,36	(10.721.283.094,00)	(0,64)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.270.333.000,00	28.646.168.991,00	981.257.388,00	29.627.426.379,00	84,00	(5.642.906.621,00)	(16,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	33.478.577.000,00	27.411.194.900,00	798.299.843,00	28.209.494.743,00	84,26	(5.269.082.257,00)	(15,74)
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	9.639.437.000,00	6.869.451.594,00	1.171.896.693,00	8.041.348.287,00	83,42	(1.598.088.713,00)	(16,58)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	16.425.433.000,00	12.761.712.456,00	-	12.761.712.456,00	77,69	(3.663.720.544,00)	(22,31)
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	-	373.596.850,00	(373.596.850,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.413.707.000,00	7.406.434.000,00	-	7.406.434.000,00	99,90	(7.273.000,00)	(0,10)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.791.756.000,00	1.234.974.091,00	182.957.545,00	1.417.931.636,00	79,14	(373.824.364,00)	(20,86)
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	474.873.000,00	303.904.000,00	32.190.572,00	336.094.572,00	70,78	(138.778.428,00)	(29,22)
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	-	17.003.500,00	(17.003.500,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	1.794.000,00	(1.794.000,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.042.211.000,00	135.418.391,00	565.816.200,00	701.234.591,00	67,28	(340.976.409,00)	(32,72)

4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	-	565.816.200,00	(565.816.200,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	21.519.000,00	21.519.000,00	14.827.929,00	36.346.929,00	168,91	14.827.929,00	68,91
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	181.972.000,00	160.453.000,00	130.784.025,00	291.237.025,00	160,04	109.265.025,00	60,04
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	31.717.000,00	21.547.000,00	5.023.761,00	26.570.761,00	83,77	(5.146.239,00)	(16,23)
4.2.1.02.12	Bagi Hasil SDA Mineral Batubara	39.464.000,00	7.519.000,00	18.928.758,00	26.447.758,00	67,02	(13.016.242,00)	(32,98)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00	-	1.234.003.169.000,00	100,00	-	-
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00	-	1.234.003.169.000,00	100,00	-	-
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00	-	1.234.003.169.000,00	100,00	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	395.583.085.000,00	375.352.814.701,00	15.151.893.826,00	390.504.708.527,00	98,72	(5.078.376.473,00)	(1,28)
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	13.172.216.000,00	9.220.551.200,00	-	9.220.551.200,00	70,00	(3.951.664.800,00)	(30,00)
4.2.3.01.01	Dak Pendidikan SD/SDLB	11.731.491.000,00	8.860.369.950,00	(652.024.692,00)	8.208.345.258,00	69,97	(3.523.145.742,00)	(30,03)
4.2.3.01.02	DAK Pendidikan SMP	1.440.725.000,00	360.181.250,00	652.024.692,00	1.012.205.942,00	70,26	(428.519.058,00)	(29,74)
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB	15.534.934.000,00	10.874.453.800,00	3.390.059.626,00	14.264.513.426,00	91,82	(1.270.420.574,00)	(8,18)
4.2.3.02.01	Pelayanan Dasar	5.945.839.000,00	4.162.087.300,00	1.297.375.819,00	5.459.463.119,00	91,82	(486.375.881,00)	(8,18)
4.2.3.02.02	Pelayanan Rujukan	3.676.482.000,00	2.573.537.400,00	802.088.107,00	3.375.625.507,00	91,82	(300.856.493,00)	(8,18)
4.2.3.02.03	Pelayanan Kefarmasian	4.984.367.000,00	3.489.056.900,00	1.087.531.128,00	4.576.588.028,00	91,82	(407.778.972,00)	(8,18)
4.2.3.02.04	Keluarga Berencana	472.508.000,00	330.755.600,00	103.396.819,00	434.152.419,00	91,88	(38.355.581,00)	(8,12)
4.2.3.02.05	Pendukung Peralatan Imunisasi	455.738.000,00	319.016.600,00	99.667.753,00	418.684.353,00	91,87	(37.053.647,00)	(8,13)
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	16.614.820.000,00	7.777.050.100,00	7.722.019.900,00	15.499.070.000,00	93,28	(1.115.750.000,00)	(6,72)

4.2.3.03.01	Air Minum	7.966.723.000,00	4.706.530.750,00	2.144.661.250,00	6.851.192.000,00	86,00	(1.115.531.000,00)	(14,00)
4.2.3.03.02	Sanitasi	8.648.097.000,00	3.070.519.350,00	5.577.358.650,00	8.647.878.000,00	100,00	(219.000,00)	(0,00)
4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan	3.499.297.000,00	3.499.297.000,00	-	3.499.297.000,00	100,00	-	-
4.2.3.04.02	Pertanian	3.499.297.000,00	3.499.297.000,00	-	3.499.297.000,00	100,00	-	-
4.2.3.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan	1.258.643.000,00	881.050.100,00	228.843.900,00	1.109.894.000,00	88,18	(148.749.000,00)	(11,82)
4.2.3.06.01	Kelautan dan Perikanan	1.258.643.000,00	881.050.100,00	228.843.900,00	1.109.894.000,00	88,18	(148.749.000,00)	(11,82)
4.2.3.08	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	834.356.000,00	832.327.000,00	-	832.327.000,00	99,76	(2.029.000,00)	(0,24)
4.2.3.08.01	Lingkungan Hidup	834.356.000,00	832.327.000,00	-	832.327.000,00	99,76	(2.029.000,00)	(0,24)
4.2.3.10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	4.537.419.000,00	2.287.577.600,00	1.827.620.400,00	4.115.198.000,00	90,69	(422.221.000,00)	(9,31)
4.2.3.10.01	Sarana Perdagangan	2.863.836.000,00	1.116.069.500,00	1.544.565.500,00	2.660.635.000,00	92,90	(203.201.000,00)	(7,10)
4.2.3.10.03	Pariwisata	1.673.583.000,00	1.171.508.100,00	283.054.900,00	1.454.563.000,00	86,91	(219.020.000,00)	(13,09)
4.2.3.11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang	18.237.316.000,00	14.525.715.700,00	2.243.893.300,00	16.769.609.000,00	91,95	(1.467.707.000,00)	(8,05)
4.2.3.11.01	Jalan	18.237.316.000,00	12.766.121.200,00	4.003.487.800,00	16.769.609.000,00	91,95	(1.467.707.000,00)	(8,05)
4.2.3.11.02	Sarpras Irigasi dan Air Minum	-	1.759.594.500,00	(1.759.594.500,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi	3.910.210.000,00	4.830.876.400,00	(1.702.219.400,00)	3.128.657.000,00	80,01	(781.553.000,00)	(19,99)
4.2.3.13.01	Air Minum	-	870.175.350,00	(870.175.350,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.13.02	Sanitasi	-	2.983.148.550,00	(2.983.148.550,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.13.03	Infrastruktur Irigasi	3.910.210.000,00	977.552.500,00	2.151.104.500,00	3.128.657.000,00	80,01	(781.553.000,00)	(19,99)
4.2.3.14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	307.530.804.000,00	312.272.521.901,00	-	312.272.521.901,00	101,54	4.741.717.901,00	1,54

4.2.3.14.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	307.530.804.000,00	312.272.521.901,00	-	312.272.521.901,00	101,54	4.741.717.901,00	1,54
4.2.3.15.03	Pasar	-	1.034.244.900,00	(1.034.244.900,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.16	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Pemukiman	10.453.070.000,00	7.317.149.000,00	2.475.921.000,00	9.793.070.000,00	93,69	(660.000.000,00)	(6,31)
4.2.3.16.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Pemukiman	10.453.070.000,00	7.317.149.000,00	2.475.921.000,00	9.793.070.000,00	93,69	(660.000.000,00)	(6,31)
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	608.012.101.000,00	474.598.080.389,00	159.034.387.821,00	633.632.468.210,00	104,21	25.620.367.210,00	4,21
4.3.1	Pendapatan Hibah	121.770.000.000,00	21.068.744.638,00	105.521.474.826,00	126.590.219.464,00	103,96	4.820.219.464,00	3,96
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	5.547.503.090,00	5.547.503.090,00	-	5.547.503.090,00	(100,00)
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	121.770.000.000,00	21.068.744.638,00	99.973.971.736,00	121.042.716.374,00	99,40	(727.283.626,00)	(0,60)
4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	121.770.000.000,00	21.068.744.638,00	99.973.971.736,00	121.042.716.374,00	99,40	(727.283.626,00)	(0,60)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	125.676.172.000,00	100.795.946.651,00	32.347.908.095,00	133.143.854.746,00	105,94	7.467.682.746,00	5,94
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	125.676.172.000,00	100.795.946.651,00	32.347.908.095,00	133.143.854.746,00	105,94	7.467.682.746,00	5,94
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	30.380.477.000,00	22.685.855.810,00	8.550.816.668,00	31.236.672.478,00	102,82	856.195.478,00	2,82
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.911.888.000,00	17.737.920.187,00	5.199.762.206,00	22.937.682.393,00	104,68	1.025.794.393,00	4,68
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.502.798.000,00	23.823.655.190,00	8.869.563.345,00	32.693.218.535,00	123,36	6.190.420.535,00	23,36
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	-	33.644.455,00	(33.644.455,00)	-	-	-	(100,00)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	289.632.000,00	255.987.296,00	93.039.875,00	349.027.171,00	120,51	59.395.171,00	20,51
4.3.3.01.08	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	46.591.377.000,00	36.258.883.713,00	9.668.370.456,00	45.927.254.169,00	98,57	(664.122.831,00)	(1,43)
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.874.750.000,00	2.709.752.100,00	21.165.004.900,00	23.874.757.000,00	241,78	14.000.007.000,00	141,78
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	9.874.750.000,00	2.709.752.100,00	21.165.004.900,00	23.874.757.000,00	241,78	14.000.007.000,00	141,78

4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	9.874.750.000,00	2.709.752.100,00	21.165.004.900,00	23.874.757.000,00	241,78	14.000.007.000,00	141,78
4.3.6	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	350.691.179.000,00	350.023.637.000,00	-	350.023.637.000,00	99,81	(667.542.000,00)	(0,19)
4.3.6.01	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	350.691.179.000,00	350.023.637.000,00	-	350.023.637.000,00	99,81	(667.542.000,00)	(0,19)
4.3.6.01.01	Dana Desa	350.691.179.000,00	350.023.637.000,00	-	350.023.637.000,00	99,81	(667.542.000,00)	(0,19)
C.P	C.P	-	728.054.648,00	34.272.301.001,00	35.000.355.649,00	-	35.000.355.649,00	(100,00)
Non Anggaran	Non Anggaran	-	263.201.353.253,00	6.465.876.063,00	269.667.229.316,00	-	269.667.229.316,00	(100,00)
	JUMLAH SELURUH PENDAPATAN DAERAH	2.636.961.029.000,00	2.417.987.091.377,00	221.914.672.420,38	2.639.901.763.797,38	100,11	2.940.734.797,38	0,11

Kebumen, 04 April 2019

An. BUPATI KEBUMEN
SEKRETARIS DAERAH

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199201 1 002



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2018
BAGIAN BULAN DESEMBER 2018

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN PENDAPATAN	PENERIMAAN			%	SELISIH KURANG /LEBIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN	2.636.961.029.000,00	2.417.987.091.377,00	221.914.672.420,38	2.639.901.763.797,38	100,11	2.940.734.797,38	0,11
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.092.341.000,00	305.386.858.296,00	46.747.133.385,38	352.133.991.681,38	96,72	(11.958.349.318,62)	(3,28)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	90.126.000.000,00	88.971.852.891,00	7.803.740.211,00	96.775.593.102,00	107,38	6.649.593.102,00	7,38
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.600.000.000,00	1.321.604.980,00	144.509.997,00	1.466.114.977,00	91,63	(133.885.023,00)	(8,37)
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.000.000.000,00	913.697.593,00	104.069.211,00	1.017.766.804,00	101,78	17.766.804,00	1,78
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	400.000.000,00	232.914.913,00	20.853.286,00	253.768.199,00	63,44	(146.231.801,00)	(36,56)
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	100.000.000,00	93.968.600,00	8.977.500,00	102.946.100,00	102,95	2.946.100,00	2,95
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	50.000.000,00	39.028.374,00	5.185.000,00	44.213.374,00	88,43	(5.786.626,00)	(11,57)
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	50.000.000,00	41.995.500,00	5.425.000,00	47.420.500,00	94,84	(2.579.500,00)	(5,16)
4.1.1.02	Pajak Restoran	5.000.000.000,00	4.543.207.844,00	1.303.985.673,00	5.847.193.517,00	116,94	847.193.517,00	16,94
4.1.1.02.02	Rumah Makan	850.000.000,00	834.386.564,00	80.373.002,00	914.759.566,00	107,62	64.759.566,00	7,62
4.1.1.02.05	Katering/Jasa Boga	4.150.000.000,00	3.708.821.280,00	1.223.612.671,00	4.932.433.951,00	118,85	782.433.951,00	18,85
4.1.1.03	Pajak Hiburan	165.000.000,00	148.682.500,00	9.136.595,00	157.819.095,00	95,65	(7.180.905,00)	(4,35)
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000,00	4.700.000,00	-	4.700.000,00	235,00	2.700.000,00	135,00
4.1.1.03.07	Karaoke	60.000.000,00	55.450.000,00	5.500.000,00	60.950.000,00	101,58	950.000,00	1,58

4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	70.400.000,00	55.382.500,00	1.846.595,00	57.229.095,00	81,29	(13.170.905,00)	(18,71)
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	17.000.000,00	15.050.000,00	1.490.000,00	16.540.000,00	97,29	(460.000,00)	(2,71)
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	15.600.000,00	18.100.000,00	300.000,00	18.400.000,00	117,95	2.800.000,00	17,95
4.1.1.04	Pajak Reklame	900.000.000,00	672.599.748,00	148.830.005,00	821.429.753,00	91,27	(78.570.247,00)	(8,73)
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	500.000.000,00	377.142.128,00	127.707.305,00	504.849.433,00	100,97	4.849.433,00	0,97
4.1.1.04.02	Reklame Kain	400.000.000,00	295.457.620,00	21.122.700,00	316.580.320,00	79,15	(83.419.680,00)	(20,85)
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	29.500.000.000,00	27.673.612.174,00	2.645.578.666,00	30.319.190.840,00	102,78	819.190.840,00	2,78
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	29.500.000.000,00	27.673.612.174,00	2.645.578.666,00	30.319.190.840,00	102,78	819.190.840,00	2,78
	PPJ PLN Area Cilacap	29.400.000.000,00	27.569.036.489,00	2.635.997.889,00	30.205.034.378,00	102,74	805.034.378,00	2,74
	PPJ PLN Area Purwokerto	100.000.000,00	104.575.685,00	9.580.777,00	114.156.462,00	114,16	14.156.462,00	14,16
4.1.1.07	Pajak Parkir	200.000.000,00	227.748.410,00	16.602.000,00	244.350.410,00	122,18	44.350.410,00	22,18
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	200.000.000,00	227.748.410,00	16.602.000,00	244.350.410,00	122,18	44.350.410,00	22,18
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	209.512.513,00	17.104.985,00	226.617.498,00	113,31	26.617.498,00	13,31
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	209.512.513,00	17.104.985,00	226.617.498,00	113,31	26.617.498,00	13,31
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	9.350.000,00	-	9.350.000,00	93,50	(650.000,00)	(6,50)
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	9.350.000,00	-	9.350.000,00	93,50	(650.000,00)	(6,50)
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	3.326.239.499,00	1.998.621.275,00	5.324.860.774,00	177,50	2.324.860.774,00	77,50
4.1.1.11.04	Batu Kapur	40.000.000,00	37.471.888,00	3.763.372,00	41.235.260,00	103,09	1.235.260,00	3,09
4.1.1.11.06	Batu Gunung/Kali	1.470.000.000,00	1.942.756.045,00	1.071.553.626,00	3.014.309.671,00	205,06	1.544.309.671,00	105,06
4.1.1.11.23	Pasir dan kerikil	1.238.000.000,00	1.185.821.236,00	797.301.310,00	1.983.122.546,00	160,19	745.122.546,00	60,19

4.1.1.11.29	Tanah Timbun	252.000.000,00	160.190.330,00	126.002.967,00	286.193.297,00	113,57	34.193.297,00	13,57
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.000.000.000,00	41.784.013.122,00	464.598.648,00	42.248.611.770,00	103,05	1.248.611.770,00	3,05
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.000.000.000,00	41.784.013.122,00	464.598.648,00	42.248.611.770,00	103,05	1.248.611.770,00	3,05
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.551.000.000,00	9.055.282.101,00	1.054.772.367,00	10.110.054.468,00	118,23	1.559.054.468,00	18,23
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.551.000.000,00	9.055.282.101,00	1.054.772.367,00	10.110.054.468,00	118,23	1.559.054.468,00	18,23
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	48.378.072.000,00	33.229.344.863,00	4.279.448.910,00	37.508.793.773,00	77,53	(10.869.278.227,00)	(22,47)
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	32.766.744.000,00	17.806.895.243,00	1.984.100.625,00	19.790.995.868,00	60,40	(12.975.748.132,00)	(39,60)
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.200.000.000,00	11.698.407.543,00	1.232.537.975,00	12.930.945.518,00	51,31	(12.269.054.482,00)	(48,69)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan (DINKES)	200.000.000,00	162.507.500,00	18.267.000,00	180.774.500,00	90,39	(19.225.500,00)	(9,61)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Prembun)	25.000.000.000,00	11.535.900.043,00	1.214.270.975,00	12.750.171.018,00	51,00	(12.249.828.982,00)	(49,00)
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	870.120.000,00	745.989.200,00	86.057.000,00	832.046.200,00	95,62	(38.073.800,00)	(4,38)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISHUB)	60.120.000,00	43.232.000,00	6.085.000,00	49.317.000,00	82,03	(10.803.000,00)	(17,97)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISPERINDAG)	330.000.000,00	293.643.400,00	30.302.000,00	323.945.400,00	98,17	(6.054.600,00)	(1,83)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISPERKIM LH)	450.000.000,00	375.811.500,00	48.017.000,00	423.828.500,00	94,18	(26.171.500,00)	(5,82)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (DISPORAWISATA)	30.000.000,00	33.302.300,00	1.653.000,00	34.955.300,00	116,52	4.955.300,00	16,52
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	660.678.000,00	98.857.000,00	759.535.000,00	75,95	(240.465.000,00)	(24,05)
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar	4.320.600.000,00	3.465.422.000,00	384.983.650,00	3.850.405.650,00	89,12	(470.194.350,00)	(10,88)
4.1.2.01.23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	679.000.000,00	608.358.500,00	44.177.000,00	652.535.500,00	96,10	(26.464.500,00)	(3,90)
4.1.2.01.43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	78.400.000,00	56.672.000,00	4.312.000,00	60.984.000,00	77,79	(17.416.000,00)	(22,21)
4.1.2.01.45	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	618.624.000,00	571.368.000,00	133.176.000,00	704.544.000,00	113,89	85.920.000,00	13,89

4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	13.231.149.000,00	14.051.586.150,00	2.156.565.875,00	16.208.152.025,00	122,50	2.977.003.025,00	22,50
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.245.429.000,00	1.765.531.950,00	588.654.225,00	2.354.186.175,00	104,84	108.757.175,00	4,84
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BAPPENDA)	23.749.000,00	-	-	-	-	(23.749.000,00)	(100,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (BID. ASET - BPKAD)	150.000.000,00	148.871.650,00	95.167.625,00	244.039.275,00	162,69	94.039.275,00	62,69
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DINLUTKAN)	269.000.000,00	46.520.000,00	186.415.000,00	232.935.000,00	86,59	(36.065.000,00)	(13,41)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISHUB)	72.980.000,00	56.536.000,00	122.334.000,00	178.870.000,00	245,09	105.890.000,00	145,09
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISNAKER KUKM)	29.000.000,00	43.629.000,00	9.606.000,00	53.235.000,00	183,57	24.235.000,00	83,57
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISPERINDAG)	-	8.760.000,00	-	8.760.000,00	-	8.760.000,00	(100,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISPORAWISATA)	350.000.000,00	364.617.800,00	47.080.600,00	411.698.400,00	117,63	61.698.400,00	17,63
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DISTAPANG)	26.600.000,00	51.993.500,00	825.000,00	52.818.500,00	198,57	26.218.500,00	98,57
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPM PTSP)	199.100.000,00	199.411.500,00	1.250.000,00	200.661.500,00	100,78	1.561.500,00	0,78
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (DPU PR)	874.000.000,00	675.600.000,00	81.700.000,00	757.300.000,00	86,65	(116.700.000,00)	(13,35)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kecamatan Karanganyar)	-	3.012.500,00	-	3.012.500,00	-	3.012.500,00	(100,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kecamatan Sempor)	-	360.000,00	-	360.000,00	-	360.000,00	(100,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kelurahan Kebumen)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00	-	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (SETDA BAG. UMUM)	250.000.000,00	165.220.000,00	44.276.000,00	209.496.000,00	83,80	(40.504.000,00)	(16,20)
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	1.300.000.000,00	1.338.048.800,00	390.787.450,00	1.728.836.250,00	132,99	428.836.250,00	32,99
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal	180.000.000,00	150.693.400,00	19.009.100,00	169.702.500,00	94,28	(10.297.500,00)	(5,72)
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.818.000.000,00	2.865.710.500,00	275.449.500,00	3.141.160.000,00	111,47	323.160.000,00	11,47
	Retribusi Tempat Khusus Parkir (DISPERINDAG)	2.208.000.000,00	2.301.641.500,00	215.708.500,00	2.517.350.000,00	114,01	309.350.000,00	14,01

	Retribusi Tempat Khusus Parkir (DISPORAWISATA)	610.000.000,00	564.069.000,00	59.741.000,00	623.810.000,00	102,26	13.810.000,00	2,26
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2.720.000,00	1.940.000,00	360.000,00	2.300.000,00	84,56	(420.000,00)	(15,44)
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.500.000.000,00	7.630.316.500,00	846.223.100,00	8.476.539.600,00	130,41	1.976.539.600,00	30,41
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	165.000.000,00	267.352.500,00	33.170.000,00	300.522.500,00	182,13	135.522.500,00	82,13
4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	31.992.500,00	2.912.500,00	34.905.000,00	174,53	14.905.000,00	74,53
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.380.179.000,00	1.370.863.470,00	138.782.410,00	1.509.645.880,00	63,43	(870.533.120,00)	(36,57)
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.320.179.000,00	1.331.743.470,00	130.612.410,00	1.462.355.880,00	63,03	(857.823.120,00)	(36,97)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (DPU PR)	2.150.000.000,00	1.234.210.650,00	94.575.700,00	1.328.786.350,00	61,80	(821.213.650,00)	(38,20)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Adimulyo)	7.000.000,00	6.978.000,00	-	6.978.000,00	99,69	(22.000,00)	(0,31)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Alian)	6.000.000,00	-	1.659.000,00	1.659.000,00	27,65	(4.341.000,00)	(72,35)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Ambal)	5.000.000,00	-	691.000,00	691.000,00	13,82	(4.309.000,00)	(86,18)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Ayah)	10.000.000,00	5.050.000,00	-	5.050.000,00	50,50	(4.950.000,00)	(49,50)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Bonorowo)	2.500.000,00	2.787.000,00	-	2.787.000,00	111,48	287.000,00	11,48
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Buayan)	4.000.000,00	963.900,00	4.604.800,00	5.568.700,00	139,22	1.568.700,00	39,22
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Buluspesantren)	2.000.000,00	425.000,00	2.335.000,00	2.760.000,00	138,00	760.000,00	38,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Gombang)	17.100.000,00	20.341.500,00	2.335.000,00	22.676.500,00	132,61	5.576.500,00	32,61
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Karanganyar)	10.000.000,00	2.799.300,00	-	2.799.300,00	27,99	(7.200.700,00)	(72,01)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Karanggayam)	3.000.000,00	2.782.000,00	-	2.782.000,00	92,73	(218.000,00)	(7,27)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Karangsambung)	1.779.000,00	1.518.600,00	635.000,00	2.153.600,00	121,06	374.600,00	21,06
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Kebumen)	27.000.000,00	12.691.000,00	20.424.910,00	33.115.910,00	122,65	6.115.910,00	22,65

	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Klirong)	3.000.000,00	4.404.000,00	461.000,00	4.865.000,00	162,17	1.865.000,00	62,17
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Kutowinangun)	15.500.000,00	6.264.880,00	-	6.264.880,00	40,42	(9.235.120,00)	(59,58)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Kuwarasan)	500.000,00	-	-	-	-	(500.000,00)	(100,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Mirit)	10.000.000,00	-	-	-	-	(10.000.000,00)	(100,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Padureso)	1.500.000,00	868.250,00	-	868.250,00	57,88	(631.750,00)	(42,12)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Pejagoan)	7.000.000,00	2.920.000,00	1.931.000,00	4.851.000,00	69,30	(2.149.000,00)	(30,70)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Petanahan)	5.000.000,00	4.647.000,00	-	4.647.000,00	92,94	(353.000,00)	(7,06)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Poncowarno)	2.500.000,00	656.000,00	-	656.000,00	26,24	(1.844.000,00)	(73,76)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Prembun)	7.000.000,00	6.580.000,00	-	6.580.000,00	94,00	(420.000,00)	(6,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Puring)	1.800.000,00	1.390.000,00	-	1.390.000,00	77,22	(410.000,00)	(22,78)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Rowokele)	3.500.000,00	3.425.100,00	-	3.425.100,00	97,86	(74.900,00)	(2,14)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Sadang)	2.000.000,00	-	960.000,00	960.000,00	48,00	(1.040.000,00)	(52,00)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Sempor)	3.000.000,00	4.997.790,00	-	4.997.790,00	166,59	1.997.790,00	66,59
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Kecamatan Sruweng)	12.500.000,00	5.043.500,00	-	5.043.500,00	40,35	(7.456.500,00)	(59,65)
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek	60.000.000,00	39.120.000,00	8.170.000,00	47.290.000,00	78,82	(12.710.000,00)	(21,18)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.629.329.000,00	9.734.494.832,00	-	9.734.494.832,00	101,09	105.165.832,00	1,09
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.629.329.000,00	9.734.494.832,00	-	9.734.494.832,00	101,09	105.165.832,00	1,09
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PDAM	1.051.649.000,00	1.156.814.410,00	-	1.156.814.410,00	110,00	105.165.410,00	10,00
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo	100.124.000,00	100.124.278,00	-	100.124.278,00	100,00	278,00	0,00
4.1.3.01.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR Kebumen	779.697.000,00	779.696.827,00	-	779.696.827,00	100,00	(173,00)	(0,00)

4.1.3.01.04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen	2.759.341.000,00	2.759.340.653,00	-	2.759.340.653,00	100,00	(347,00)	(0,00)
4.1.3.01.06	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jateng	4.938.518.000,00	4.938.518.664,00	-	4.938.518.664,00	100,00	664,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215.958.940.000,00	173.451.165.710,00	34.663.944.264,38	208.115.109.974,38	96,37	(7.843.830.025,62)	(3,63)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	513.750.000,00	827.279.553,00	167.917.800,00	995.197.353,00	193,71	481.447.353,00	93,71
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	15.000.000,00	15.927.200,00	-	15.927.200,00	106,18	927.200,00	6,18
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	60.000.000,00	51.058.299,00	29.736.912,00	80.795.211,00	134,66	20.795.211,00	34,66
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	60.000.000,00	-	74.683.888,00	74.683.888,00	124,47	14.683.888,00	24,47
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	318.750.000,00	696.991.554,00	53.497.000,00	750.488.554,00	235,45	431.738.554,00	135,45
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	60.000.000,00	63.302.500,00	10.000.000,00	73.302.500,00	122,17	13.302.500,00	22,17
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	4.003.691.458,00	598.205.742,00	4.601.897.200,00	131,48	1.101.897.200,00	31,48
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	3.814.032.539,00	456.584.585,00	4.270.617.124,00	122,02	770.617.124,00	22,02
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	-	184.629.784,00	141.621.157,00	326.250.941,00	-	326.250.941,00	(100,00)
4.1.4.02.04	Jasa Giro Dana JKN	-	5.029.135,00	-	5.029.135,00	-	5.029.135,00	(100,00)
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	23.400.000.000,00	18.910.274.021,00	842.482.259,00	19.752.756.280,00	84,41	(3.647.243.720,00)	(15,59)
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank Jateng	20.014.234.000,00	16.336.928.390,00	608.321.914,00	16.945.250.304,00	84,67	(3.068.983.696,00)	(15,33)
4.1.4.03.02	Rekening Deposito Pada Bank BNI	1.277.108.000,00	692.107.552,00	43.705.480,00	735.813.032,00	57,62	(541.294.968,00)	(42,38)
4.1.4.03.03	Rekening Deposito Pada Bank BRI	1.553.242.000,00	1.417.581.934,00	164.811.030,00	1.582.392.964,00	101,88	29.150.964,00	1,88
4.1.4.03.04	Rekening Deposito Pada Bank Mandiri	555.416.000,00	463.656.145,00	25.643.835,00	489.299.980,00	88,10	(66.116.020,00)	(11,90)
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	190.607.419,00	396.740.955,00	587.348.374,00	-	587.348.374,00	(100,00)
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	-	413.570,00	6.779.421,00	7.192.991,00	-	7.192.991,00	(100,00)

4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	-	4.748.000,00	10.868.467,00	15.616.467,00	-	15.616.467,00	(100,00)
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	-	183.457.049,00	362.539.812,00	545.996.861,00	-	545.996.861,00	(100,00)
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	-	-	317.900,00	317.900,00	-	317.900,00	(100,00)
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup	-	1.988.800,00	16.235.355,00	18.224.155,00	-	18.224.155,00	(100,00)
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	232.315.000,00	295.987.443,00	28.931.093,00	324.918.536,00	139,86	92.603.536,00	39,86
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.725.000,00	1.951.017,00	-	1.951.017,00	71,60	(773.983,00)	(28,40)
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	260.000,00	49.336,00	58.400,00	107.736,00	41,44	(152.264,00)	(58,56)
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	128.000,00	2.000,00	-	2.000,00	1,56	(126.000,00)	(98,44)
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	880.000,00	138.053,00	-	138.053,00	15,69	(741.947,00)	(84,31)
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	72.000,00	397.696,00	-	397.696,00	552,36	325.696,00	452,36
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.600.000,00	100.298,00	-	100.298,00	6,27	(1.499.702,00)	(93,73)
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	47.821.392,00	-	47.821.392,00	-	47.821.392,00	(100,00)
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	226.650.000,00	245.527.651,00	28.872.693,00	274.400.344,00	121,07	47.750.344,00	21,07
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	413.000.000,00	482.075.660,00	35.171.010,00	517.246.670,00	125,24	104.246.670,00	25,24
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Penduduk	400.000.000,00	470.630.000,00	33.790.000,00	504.420.000,00	126,11	104.420.000,00	26,11
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.425.860,00	1.077.410,00	11.503.270,00	115,03	1.503.270,00	15,03
4.1.4.08.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	3.000.000,00	1.019.800,00	303.600,00	1.323.400,00	44,11	(1.676.600,00)	(55,89)
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	230.877.000,00	230.877.650,00	114.948.000,00	345.825.650,00	149,79	114.948.650,00	49,79
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	2.500.000.000,00	2.670.953.673,00	(756.876.116,00)	1.914.077.557,00	76,56	(585.922.443,00)	(23,44)
4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	2.250.000.000,00	2.367.840.956,00	(776.508.776,00)	1.591.332.180,00	70,73	(658.667.820,00)	(29,27)

4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	303.112.717,00	19.632.660,00	322.745.377,00	129,10	72.745.377,00	29,10
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.024.845.000,00	1.064.926.560,00	40.038.602,00	1.104.965.162,00	107,82	80.120.162,00	7,82
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	204.845.000,00	254.708.572,00	35.164.872,00	289.873.444,00	141,51	85.028.444,00	41,51
	Fasilitas Umum (BID. ASET - BPKAD)	14.000.000,00	27.000.000,00	-	27.000.000,00	192,86	13.000.000,00	92,86
	Fasilitas Umum (DISHUB)	24.000.000,00	20.450.000,00	9.500.000,00	29.950.000,00	124,79	5.950.000,00	24,79
	Fasilitas Umum (DISKOMINFO)	161.845.000,00	188.008.572,00	25.664.872,00	213.673.444,00	132,02	51.828.444,00	32,02
	Fasilitas Umum (DISNAKER KUKM)	5.000.000,00	19.250.000,00	-	19.250.000,00	385,00	14.250.000,00	285,00
4.1.4.11.03	Tanah Pertanian Eks Bengkok Kelurahan	820.000.000,00	810.217.988,00	4.873.730,00	815.091.718,00	99,40	(4.908.282,00)	(0,60)
	Tanah Pertanian Eks Bengkok Kelurahan (Bid. Aset BPKAD)	820.000.000,00	810.217.988,00	4.873.730,00	815.091.718,00	99,40	(4.908.282,00)	(0,60)
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	182.012.878.000,00	142.610.337.719,00	33.066.568.214,00	175.676.905.933,00	96,52	(6.335.972.067,00)	(3,48)
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	180.273.878.000,00	140.949.543.861,00	32.662.966.963,00	173.612.510.824,00	96,30	(6.661.367.176,00)	(3,70)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Pengobatan Penyakit Paru)	950.000.000,00	669.923.616,00	46.267.440,00	716.191.056,00	75,39	(233.808.944,00)	(24,61)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Adimulyo)	1.381.738.000,00	1.205.972.502,00	232.720.711,00	1.438.693.213,00	104,12	56.955.213,00	4,12
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Alian)	2.987.831.000,00	2.891.864.839,00	557.486.024,00	3.449.350.863,00	115,45	461.519.863,00	15,45
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Ambal I)	1.793.346.000,00	1.644.786.875,00	336.492.698,00	1.981.279.573,00	110,48	187.933.573,00	10,48
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Ambal II)	1.143.270.000,00	1.001.157.038,00	241.412.795,00	1.242.569.833,00	108,69	99.299.833,00	8,69
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Ayah I)	2.219.025.000,00	1.505.229.770,00	314.575.828,00	1.819.805.598,00	82,01	(399.219.402,00)	(17,99)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Ayah II)	1.181.395.000,00	980.213.684,00	215.100.995,00	1.195.314.679,00	101,18	13.919.679,00	1,18
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Bonorowo)	1.121.035.000,00	956.257.636,00	151.140.325,00	1.107.397.961,00	98,78	(13.637.039,00)	(1,22)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Buayan)	1.889.692.000,00	1.898.966.081,00	365.200.112,00	2.264.166.193,00	119,82	374.474.193,00	19,82

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Buluspesantren I)	1.403.385.000,00	1.187.166.072,00	236.070.591,00	1.423.236.663,00	101,41	19.851.663,00	1,41
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Buluspesantren II)	1.279.857.000,00	1.028.110.225,00	197.020.589,00	1.225.130.814,00	95,72	(54.726.186,00)	(4,28)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Gombang I)	1.182.553.000,00	1.099.520.531,00	222.396.438,00	1.321.916.969,00	111,79	139.363.969,00	11,79
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Gombang II)	1.121.619.000,00	932.772.684,00	190.527.385,00	1.123.300.069,00	100,15	1.681.069,00	0,15
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Karanganyar)	2.221.386.000,00	1.787.211.890,00	330.347.454,00	2.117.559.344,00	95,33	(103.826.656,00)	(4,67)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Karanggayam I)	2.050.464.000,00	1.635.380.782,00	313.033.098,00	1.948.413.880,00	95,02	(102.050.120,00)	(4,98)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Karanggayam II)	1.187.902.000,00	873.361.985,00	175.689.042,00	1.049.051.027,00	88,31	(138.850.973,00)	(11,69)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Karangsambung)	2.347.733.000,00	2.068.954.210,00	436.072.030,00	2.505.026.240,00	106,70	157.293.240,00	6,70
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kebumen I)	2.325.583.000,00	1.847.473.377,00	414.126.261,00	2.261.599.638,00	97,25	(63.983.362,00)	(2,75)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kebumen II)	2.240.322.000,00	1.815.888.533,00	385.767.791,00	2.201.656.324,00	98,27	(38.665.676,00)	(1,73)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kebumen III)	1.179.688.000,00	1.073.209.415,00	226.308.035,00	1.299.517.450,00	110,16	119.829.450,00	10,16
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Klirong I)	1.728.577.000,00	1.484.222.278,00	296.126.390,00	1.780.348.668,00	103,00	51.771.668,00	3,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Klirong II)	1.023.965.000,00	887.476.855,00	193.773.295,00	1.081.250.150,00	105,59	57.285.150,00	5,59
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kutowinangun)	2.661.384.000,00	2.367.900.323,00	561.254.576,00	2.929.154.899,00	110,06	267.770.899,00	10,06
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Kuwarasan)	2.124.277.000,00	1.865.380.361,00	391.884.771,00	2.257.265.132,00	106,26	132.988.132,00	6,26
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Mirit)	2.398.791.000,00	2.184.836.360,00	409.588.626,00	2.594.424.986,00	108,16	195.633.986,00	8,16
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Padureso)	1.074.551.000,00	866.854.355,00	180.728.012,00	1.047.582.367,00	97,49	(26.968.633,00)	(2,51)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Pejagoan)	3.016.502.000,00	2.508.790.323,00	515.112.274,00	3.023.902.597,00	100,25	7.400.597,00	0,25
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Petanahan)	2.550.973.000,00	2.226.608.997,00	436.106.680,00	2.662.715.677,00	104,38	111.742.677,00	4,38
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Poncowarno)	959.645.000,00	809.270.048,00	167.564.356,00	976.834.404,00	101,79	17.189.404,00	1,79

	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Prembun)	966.759.000,00	789.525.846,00	167.940.913,00	957.466.759,00	99,04	(9.292.241,00)	(0,96)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Puring)	1.806.587.000,00	1.671.681.385,00	349.380.782,00	2.021.062.167,00	111,87	214.475.167,00	11,87
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Rowokele)	2.488.424.000,00	1.959.768.954,00	403.569.984,00	2.363.338.938,00	94,97	(125.085.062,00)	(5,03)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Sadang)	1.073.640.000,00	861.217.374,00	166.056.299,00	1.027.273.673,00	95,68	(46.366.327,00)	(4,32)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Sempor I)	1.953.710.000,00	1.683.882.421,00	316.432.121,00	2.000.314.542,00	102,39	46.604.542,00	2,39
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Sempor II)	1.116.390.000,00	900.043.967,00	189.464.240,00	1.089.508.207,00	97,59	(26.881.793,00)	(2,41)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (Puskesmas Sruweng)	1.860.879.000,00	1.636.254.066,00	346.227.199,00	1.982.481.265,00	106,53	121.602.265,00	6,53
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD Soedirman)	118.261.000.000,00	88.142.408.203,00	21.984.000.803,00	110.126.409.006,00	93,12	(8.134.590.994,00)	(6,88)
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.739.000.000,00	1.660.793.858,00	403.601.251,00	2.064.395.109,00	118,71	325.395.109,00	18,71
4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	50.000.000,00	18.550.000,00	34.225.000,00	52.775.000,00	105,55	2.775.000,00	5,55
4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	50.000.000,00	18.550.000,00	34.225.000,00	52.775.000,00	105,55	2.775.000,00	5,55
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.081.275.000,00	2.145.604.554,00	95.591.705,38	2.241.196.259,38	107,68	159.921.259,38	7,68
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.081.275.000,00	2.145.604.554,00	95.591.705,38	2.241.196.259,38	107,68	159.921.259,38	7,68
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (BID. ASET - BPKAD)	1.900.000.000,00	246.213.997,00	82.159.557,38	328.373.554,38	17,28	(1.571.626.445,62)	(82,72)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (BID. ASET - BPKAD, TEMUAN BAWAS, BPK)	-	1.739.447.974,00	7.783.348,00	1.747.231.322,00	-	1.747.231.322,00	(100,00)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (DISPORAWISATA)	144.095.000,00	123.813.850,00	-	123.813.850,00	85,93	(20.281.150,00)	(14,07)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (RSUD Prembun)	37.180.000,00	36.128.733,00	5.648.800,00	41.777.533,00	112,37	4.597.533,00	12,37
4,2	DANA PERIMBANGAN	1.664.856.587.000,00	1.638.002.152.692,00	16.133.151.214,00	1.654.135.303.906,00	99,36	(10.721.283.094,00)	(0,64)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.270.333.000,00	28.646.168.991,00	981.257.388,00	29.627.426.379,00	84,00	(5.642.906.621,00)	(16,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	33.478.577.000,00	27.411.194.900,00	798.299.843,00	28.209.494.743,00	84,26	(5.269.082.257,00)	(15,74)

4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	9.639.437.000,00	6.869.451.594,00	1.171.896.693,00	8.041.348.287,00	83,42	(1.598.088.713,00)	(16,58)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	16.425.433.000,00	12.761.712.456,00	-	12.761.712.456,00	77,69	(3.663.720.544,00)	(22,31)
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	-	373.596.850,00	(373.596.850,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.413.707.000,00	7.406.434.000,00	-	7.406.434.000,00	99,90	(7.273.000,00)	(0,10)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.791.756.000,00	1.234.974.091,00	182.957.545,00	1.417.931.636,00	79,14	(373.824.364,00)	(20,86)
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	474.873.000,00	303.904.000,00	32.190.572,00	336.094.572,00	70,78	(138.778.428,00)	(29,22)
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	-	17.003.500,00	(17.003.500,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	1.794.000,00	(1.794.000,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.042.211.000,00	135.418.391,00	565.816.200,00	701.234.591,00	67,28	(340.976.409,00)	(32,72)
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	-	565.816.200,00	(565.816.200,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	21.519.000,00	21.519.000,00	14.827.929,00	36.346.929,00	168,91	14.827.929,00	68,91
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	181.972.000,00	160.453.000,00	130.784.025,00	291.237.025,00	160,04	109.265.025,00	60,04
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	31.717.000,00	21.547.000,00	5.023.761,00	26.570.761,00	83,77	(5.146.239,00)	(16,23)
4.2.1.02.12	Bagi Hasil SDA Mineral Batubara	39.464.000,00	7.519.000,00	18.928.758,00	26.447.758,00	67,02	(13.016.242,00)	(32,98)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00	-	1.234.003.169.000,00	100,00	-	-
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00	-	1.234.003.169.000,00	100,00	-	-
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00	-	1.234.003.169.000,00	100,00	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	395.583.085.000,00	375.352.814.701,00	15.151.893.826,00	390.504.708.527,00	98,72	(5.078.376.473,00)	(1,28)
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	13.172.216.000,00	9.220.551.200,00	-	9.220.551.200,00	70,00	(3.951.664.800,00)	(30,00)
4.2.3.01.01	Dak Pendidikan SD/SDLB	11.731.491.000,00	8.860.369.950,00	(652.024.692,00)	8.208.345.258,00	69,97	(3.523.145.742,00)	(30,03)

4.2.3.01.02	DAK Pendidikan SMP	1.440.725.000,00	360.181.250,00	652.024.692,00	1.012.205.942,00	70,26	(428.519.058,00)	(29,74)
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB	15.534.934.000,00	10.874.453.800,00	3.390.059.626,00	14.264.513.426,00	91,82	(1.270.420.574,00)	(8,18)
4.2.3.02.01	Pelayanan Dasar	5.945.839.000,00	4.162.087.300,00	1.297.375.819,00	5.459.463.119,00	91,82	(486.375.881,00)	(8,18)
4.2.3.02.02	Pelayanan Rujukan	3.676.482.000,00	2.573.537.400,00	802.088.107,00	3.375.625.507,00	91,82	(300.856.493,00)	(8,18)
4.2.3.02.03	Pelayanan Kefarmasian	4.984.367.000,00	3.489.056.900,00	1.087.531.128,00	4.576.588.028,00	91,82	(407.778.972,00)	(8,18)
4.2.3.02.04	Keluarga Berencana	472.508.000,00	330.755.600,00	103.396.819,00	434.152.419,00	91,88	(38.355.581,00)	(8,12)
4.2.3.02.05	Pendukung Peralatan Imunisasi	455.738.000,00	319.016.600,00	99.667.753,00	418.684.353,00	91,87	(37.053.647,00)	(8,13)
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	16.614.820.000,00	7.777.050.100,00	7.722.019.900,00	15.499.070.000,00	93,28	(1.115.750.000,00)	(6,72)
4.2.3.03.01	Air Minum	7.966.723.000,00	4.706.530.750,00	2.144.661.250,00	6.851.192.000,00	86,00	(1.115.531.000,00)	(14,00)
4.2.3.03.02	Sanitasi	8.648.097.000,00	3.070.519.350,00	5.577.358.650,00	8.647.878.000,00	100,00	(219.000,00)	(0,00)
4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan	3.499.297.000,00	3.499.297.000,00	-	3.499.297.000,00	100,00	-	-
4.2.3.04.02	Pertanian	3.499.297.000,00	3.499.297.000,00	-	3.499.297.000,00	100,00	-	-
4.2.3.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan	1.258.643.000,00	881.050.100,00	228.843.900,00	1.109.894.000,00	88,18	(148.749.000,00)	(11,82)
4.2.3.06.01	Kelautan dan Perikanan	1.258.643.000,00	881.050.100,00	228.843.900,00	1.109.894.000,00	88,18	(148.749.000,00)	(11,82)
4.2.3.08	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	834.356.000,00	832.327.000,00	-	832.327.000,00	99,76	(2.029.000,00)	(0,24)
4.2.3.08.01	Lingkungan Hidup	834.356.000,00	832.327.000,00	-	832.327.000,00	99,76	(2.029.000,00)	(0,24)
4.2.3.10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	4.537.419.000,00	2.287.577.600,00	1.827.620.400,00	4.115.198.000,00	90,69	(422.221.000,00)	(9,31)
4.2.3.10.01	Sarana Perdagangan	2.863.836.000,00	1.116.069.500,00	1.544.565.500,00	2.660.635.000,00	92,90	(203.201.000,00)	(7,10)
4.2.3.10.03	Pariwisata	1.673.583.000,00	1.171.508.100,00	283.054.900,00	1.454.563.000,00	86,91	(219.020.000,00)	(13,09)
4.2.3.11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang	18.237.316.000,00	14.525.715.700,00	2.243.893.300,00	16.769.609.000,00	91,95	(1.467.707.000,00)	(8,05)

4.2.3.11.01	Jalan	18.237.316.000,00	12.766.121.200,00	4.003.487.800,00	16.769.609.000,00	91,95	(1.467.707.000,00)	(8,05)
4.2.3.11.02	Sarpras Irigasi dan Air Minum	-	1.759.594.500,00	(1.759.594.500,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi	3.910.210.000,00	4.830.876.400,00	(1.702.219.400,00)	3.128.657.000,00	80,01	(781.553.000,00)	(19,99)
4.2.3.13.01	Air Minum	-	870.175.350,00	(870.175.350,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.13.02	Sanitasi	-	2.983.148.550,00	(2.983.148.550,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.13.03	Infrastruktur Irigasi	3.910.210.000,00	977.552.500,00	2.151.104.500,00	3.128.657.000,00	80,01	(781.553.000,00)	(19,99)
4.2.3.14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	307.530.804.000,00	312.272.521.901,00	-	312.272.521.901,00	101,54	4.741.717.901,00	1,54
4.2.3.14.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	307.530.804.000,00	312.272.521.901,00	-	312.272.521.901,00	101,54	4.741.717.901,00	1,54
4.2.3.15.03	Pasar	-	1.034.244.900,00	(1.034.244.900,00)	-	-	-	(100,00)
4.2.3.16	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Pemukiman	10.453.070.000,00	7.317.149.000,00	2.475.921.000,00	9.793.070.000,00	93,69	(660.000.000,00)	(6,31)
4.2.3.16.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Pemukiman	10.453.070.000,00	7.317.149.000,00	2.475.921.000,00	9.793.070.000,00	93,69	(660.000.000,00)	(6,31)
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	608.012.101.000,00	474.598.080.389,00	159.034.387.821,00	633.632.468.210,00	104,21	25.620.367.210,00	4,21
4.3.1	Pendapatan Hibah	121.770.000.000,00	21.068.744.638,00	105.521.474.826,00	126.590.219.464,00	103,96	4.820.219.464,00	3,96
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	5.547.503.090,00	5.547.503.090,00	-	5.547.503.090,00	(100,00)
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	121.770.000.000,00	21.068.744.638,00	99.973.971.736,00	121.042.716.374,00	99,40	(727.283.626,00)	(0,60)
4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	121.770.000.000,00	21.068.744.638,00	99.973.971.736,00	121.042.716.374,00	99,40	(727.283.626,00)	(0,60)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	125.676.172.000,00	100.795.946.651,00	32.347.908.095,00	133.143.854.746,00	105,94	7.467.682.746,00	5,94
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	125.676.172.000,00	100.795.946.651,00	32.347.908.095,00	133.143.854.746,00	105,94	7.467.682.746,00	5,94
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	30.380.477.000,00	22.685.855.810,00	8.550.816.668,00	31.236.672.478,00	102,82	856.195.478,00	2,82
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.911.888.000,00	17.737.920.187,00	5.199.762.206,00	22.937.682.393,00	104,68	1.025.794.393,00	4,68

4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.502.798.000,00	23.823.655.190,00	8.869.563.345,00	32.693.218.535,00	123,36	6.190.420.535,00	23,36
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	-	33.644.455,00	(33.644.455,00)	-	-	-	(100,00)
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	289.632.000,00	255.987.296,00	93.039.875,00	349.027.171,00	120,51	59.395.171,00	20,51
4.3.3.01.08	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	46.591.377.000,00	36.258.883.713,00	9.668.370.456,00	45.927.254.169,00	98,57	(664.122.831,00)	(1,43)
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.874.750.000,00	2.709.752.100,00	21.165.004.900,00	23.874.757.000,00	241,78	14.000.007.000,00	141,78
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	9.874.750.000,00	2.709.752.100,00	21.165.004.900,00	23.874.757.000,00	241,78	14.000.007.000,00	141,78
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah	9.874.750.000,00	2.709.752.100,00	21.165.004.900,00	23.874.757.000,00	241,78	14.000.007.000,00	141,78
4.3.6	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	350.691.179.000,00	350.023.637.000,00	-	350.023.637.000,00	99,81	(667.542.000,00)	(0,19)
4.3.6.01	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	350.691.179.000,00	350.023.637.000,00	-	350.023.637.000,00	99,81	(667.542.000,00)	(0,19)
4.3.6.01.01	Dana Desa	350.691.179.000,00	350.023.637.000,00	-	350.023.637.000,00	99,81	(667.542.000,00)	(0,19)
C.P	C.P	-	728.054.648,00	34.272.301.001,00	35.000.355.649,00	-	35.000.355.649,00	(100,00)
Non Anggaran	Non Anggaran	-	263.201.353.253,00	6.465.876.063,00	269.667.229.316,00	-	269.667.229.316,00	(100,00)
	JUMLAH SELURUH PENDAPATAN DAERAH	2.636.961.029.000,00	2.417.987.091.377,00	221.914.672.420,38	2.639.901.763.797,38	100,11	2.940.734.797,38	0,11

Kebumen, 04 April 2019

An. BUPATI KEBUMEN
SEKRETARIS DAERAH

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199201 1 002

